



Laporan Akhir

**SURVEI EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DI KOTA SEMARANG**

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang**

2008

KATA PENGANTAR

Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Penyaluran BLT ini menimbulkan pro dan kontra baik dari sisi bentuk (yang dipandang kurang mendidik), pendataan (yang menjadi lemah karena tidak menggunakan data terkini), maupun proses pencairannya. Survei ini bermaksud untuk melihat kondisi aktual di Kota Semarang, dan diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang komprehensif.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang mengucapkan terimakasih kepada Kantor Bank Indonesia Semarang, yang telah memberikan kepercayaan untuk melakukan *rapid survei* efektivitas BLT di Kota Semarang ini. Semoga hasil survei ini dapat memberikan manfaat terutama sebagai bagian dari kepedulian kita terhadap kaum tersingkir dan miskin.

Semarang, 30 Juni 2008

Tim Peneliti

Angelina Ika Rahutami

Westri Kekalih

Y. Sugiharto

Widuri Kurniasari

ABSTRAK

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu solusi meminimalkan dampak kenaikan harga BBM dengan memberikan subsidi langsung bagi rakyat miskin. Permasalahan utama penyaluran BLT 2008 adalah penggunaan data BPS 2005 yang menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan juga banyak pihak yang menilai bahwa BLT merupakan program yang banyak ruginya dibanding manfaat. Survei ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program BLT di kota Semarang, yang diharapkan dapat mempresentasikan pelaksanaan BLT di Jawa Tengah.

Hasil survei menunjukkan bahwa permasalahan penyaluran BLT dimulai dari kurang dilibatkannya aparat dalam verifikasi data masyarakat miskin. Terdapat pula indikasi ketidaktepatan sasaran BLT (walaupun kecil) karena ketidaksesuaian dengan kriteria kemiskinan BPS, dan atau yang kriteria miskin itu sendiri yang perlu dipertimbangkan ulang. Mekanisme pencairan BLT di Kota Semarang berjalan dengan lancar, dengan tingkat kecocokan identitas yang baik, dan proses pendistribusian BLT berjalan sesuai prosedur. Unsur ketidakpuasan terhadap pendistribusian BLT lebih banyak muncul dari sisi aparat dibanding sisi RTS BLT.

Program BLT memberikan rasa positif bagi masyarakat yang menerima, mampu mengurangi beban hidup tapi belum dapat meningkatkan daya beli secara optimal. Sebagian besar responden menyatakan uang BLT yang diterima langsung habis dikonsumsi saat itu juga, sehingga efeknya masih jauh dari panjang dampak terjadinya inflasi yang dirasakan masyarakat.

Untuk itu pembenahan penyaluran BLT di masa yang akan datang dapat dimulai dari adanya kriteria kemiskinan yang lebih tepat. Ketika kriteria kemiskinan telah dapat menggambarkan kondisi kemiskinan yang sesungguhnya maka tahap berikutnya adalah pelibatan RT/RW/Lurah baik dalam proses pendataan maupun verifikasi secara lebih banyak untuk mengurangi bias sasaran.

Tolok ukur efektivitas program BLT yang dikeluarkan oleh Menko Kesra tampaknya juga perlu diperluas dan dipertajam. Program BLT tidak dapat dikatakan efektif bila hanya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, namun perlu pula dipikirkan panjang dampak yang ditimbulkan dan disertai skema program lain yang tujuannya adalah mengembangkan kemampuan produktif (*empowering*) masyarakat, melalui program-program seperti KUR, PNPM mandiri dan lain sebagainya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu solusi meminimalkan dampak kenaikan harga BBM dengan memberikan subsidi langsung bagi rakyat miskin. Permasalahan utama penyaluran BLT 2008 adalah penggunaan data BPS 2005 yang menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan juga banyak pihak yang menilai bahwa BLT merupakan program yang banyak ruginya dibanding manfaat. Bantuan Rp100.000,00 per bulan seolah tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan hidup sebagai akibat kenaikan harga BBM. Menyimak pemberitaan yang dilakukan di media massa mengenai BLT, timbul berbagai pertanyaan seputar BLT dan efektivitasnya.

Survei ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program BLT di kota Semarang, yang diharapkan dapat mempresentasikan pelaksanaan BLT di Jawa Tengah. Kajian bertujuan untuk (i) mengidentifikasi dan menganalisis persepsi masyarakat penerima BLT di kota Semarang terhadap efektivitas penyaluran BLT, (ii) mengidentifikasi dan menganalisis persoalan di sekitar penyaluran BLT di kota Semarang, dan (iii) menganalisis berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam memperbaiki mekanisme penggantian subsidi kepada masyarakat miskin sebagai akibat kenaikan harga BBM.

Survei ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kondisi aktual yang ada di masyarakat, terutama masyarakat yang menerima BLT dan aparat yang terkait dengan penyaluran BLT. Deskripsi dan analisis mengenai efektivitas program BLT dan dampak ekonomisnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambil keputusan mengenai bentuk subsidi yang seharusnya diberikan, serta sistem dan mekanisme penyaluran subsidi secara lebih tepat.

Subyek penelitian ini adalah masyarakat penerima BLT dan aparat yang terkait dengan penyaluran BLT. Pengambilan sampel dilakukan secara *proporsional random sampling* terhadap populasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) BLT dan aparat yang terkait dengan penyaluran BLT. Kecamatan yang dipilih sebagai sampel ditetapkan berdasarkan 10 kecamatan yang menerima BLT terbanyak. Jumlah sampel sebanyak 150 responden yang terdiri dari penerima BLT sebanyak 120 orang, aparat yang terkait dengan penyaluran BLT sebanyak 30 orang, dengan rincian masing-masing kecamatan 3 Ketua RT. Selain 150 responden, maka analisis akan dipertajam dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap aparat tingkat Kelurahan sebanyak 10 orang Lurah dan 2 orang pakar. Pakar yang dipilih dalam wawancara mendalam adalah Bapak Ngargono, Ketua LP2K, sebagai representasi dari LSM yang memiliki fokus

pada perlindungan konsumen/masyarakat dan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, sebagai representasi pemerintah.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008 diberikan berdasarkan Instruksi Presiden No 3 tahun 2008 kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. BLT diberikan dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM (Departemen Sosial, 2008) dengan tujuan untuk (i) membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, (ii) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (iii) meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

BLT diberikan dengan pertimbangan bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang paling rentan, dan akan terkena dampak sosial yang paling besar. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan taraf kesejahteraannya semakin menurun atau menjadi semakin miskin. Pada tahun 2008, pemerintah melanjutkan skema program PKPS BBM dari bulan Juni sampai dengan Desember 2008 dalam bentuk BLT tanpa syarat kepada RTS sebesar Rp 100.000,00 per bulan selama 7 bulan, dengan rincian diberikan Rp 300.000,00/3 bulan (Juni-Agustus) dan Rp 400.000,00/4 bulan (September-Desember) (Departemen Sosial, 2008)

Kota Semarang menjadi daerah yang pertama kali mendapatkan BLT Jawa Tengah 2008. Mengacu data BPS Jawa Tengah tahun 2006, jumlah penerima BLT di Semarang adalah 82.665 kepala keluarga (KK) dari total 3.171.201 Rumah Tangga Miskin (RTM).

Berdasarkan hasil survei, karakteristik responden RTS BLT menunjukkan bahwa 52,50 persen menyatakan bekerja dalam kategori lain-lain karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, atau berwiraswasta seperti berdagang di pasar, kaki lima, dan 45,83 persen bekerja sebagai buruh harian, dan 1,67 persen adalah pensiunan. RTS BLT sebagian besar (98,25 persen) memiliki tanggungan keluarga kurang dari 5 orang dan hanya 1,75 persen yang memiliki tanggungan antara 5 sampai 7 orang.

Tahap pertama yang dilakukan dalam pencairan BLT adalah verifikasi data BLT yang ada. Penentuan RTS BLT didasarkan pada 14 kriteria yang dikeluarkan oleh BPS. Dari ke-14 kriteria inilah maka masyarakat akan digolongkan dalam 3 kategori yaitu hampir miskin, miskin dan sangat miskin. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan sebagian besar responden memiliki pekerjaan tidak tetap, berusaha sendiri atau menjadi buruh harian. Dari 120 responden, hanya 94 responden yang mampu menjawab penghasilan rata-rata per bulan dan 26 (21,67 persen) responden lainnya tidak mampu menghitung penghasilan mereka per bulan, karena penghasilannya sangat tidak pasti.

Responden yang menyatakan penghasilannya kurang dari Rp 500.000,00 adalah 53,33 persen, yang berpenghasilan antara Rp 500.000,00 - Rp 700.000,00 sebesar 15 persen, dan yang berpenghasilan di atas Rp

700.000,00 sebesar 10 persen (12 orang). Penghasilan rata-rata responden adalah Rp 467.553,00 pada tahun 2005 dan Rp 477.287 pada tahun 2008. Bila melihat indikasi ini maka secara penghasilan, maka responden memiliki penghasilan dibawah Rp 600.000,00 sama seperti yang disyaratkan dalam kriteria kemiskinan. Namun demikian terdapat beberapa responden yang memiliki penghasilan di atas Rp 1.000.000,00 sehingga memberikan sedikit indikasi bahwa ada ketidaktepatan sasaran bila dilihat dari sisi penghasilan.

Ketepatan sasaran RTS BLT tidak dapat dilihat hanya dari sisi penghasilan saja, karena BPS mengeluarkan 13 kriteria yang lain. Hasil survei menunjukkan bahwa 89,17 persen responden menyatakan mengkonsumsi daging atau telur atau ikan atau ayam kurang dari 2 kali dalam satu bulan dan 10,83 persen menyatakan mengkonsumsi 3 - 5 kali dalam satu bulan. Sebanyak 53,33 persen responden menyatakan memiliki jamban di dalam rumah (artinya memiliki jamban sendiri, dan bukan WC umum), 62,71 persen memiliki televisi, dan 89,17 persen menyatakan memiliki listrik.

Fakta-fakta tersebut di atas mengindikasikan adanya ketidaktepatan sasaran BLT. Ketidaktepatan kriteria RTS BLTS antara yang distandarkan oleh BPS dengan kondisi di lapangan, mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah memang terjadi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran sesuai dengan kriteria kemiskinan BPS, dan atau yang kedua adalah kriteria miskin itu sendiri yang perlu dipertimbangkan ulang. Beberapa Lurah dalam wawancara mendalam juga menyoroti hal yang sama. Mereka menyatakan bahwa pada saat ini televisi, jamban, listrik sudah bukan barang mewah lagi, terlebih di perkotaan. Sehingga keluarga yang memiliki televisi, jamban maupun listrik tidak selalu dimasukkan dalam kategori tidak miskin, karena mungkin dari sisi penghasilan, masyarakat tersebut masih masuk dalam garis kemiskinan.

Tahap berikut pencairan BLT terkait erat dengan mekanisme pembagian BLT. Berdasarkan data mekanisme pembagian BLT yang dikeluarkan oleh BPS, maka terlihat jelas bahwa pencairan BLT 2008, tidak dimulai dengan pendataan RTS baru, namun masih menggunakan data lama, yang kemudian diverifikasi pada masing-masing daerah. Secara prosedur, verifikasi tersebut dilakukan oleh petugas BPS dengan didampingi oleh RT/RW setempat, yang dipandang lebih tahu masalah dan kondisi masyarakat sebenarnya. Setelah dilakukan verifikasi maka data dikirim ke Posindo untuk dibuatkan kartu BLT, atau disebut Kartu Kompensasi BBM (KKB). Tahapan berikutnya adalah pengecekan kelayakan daftar RTS di tingkat desa/kelurahan, dan dilanjutkan dengan pembagian kartu BLT. Proses diakhiri dengan pencairan BLT oleh RTS di kantor pos.

Hal yang paling sering dikeluhkan dalam proses pencairan BLT 2008 ini adalah kurang dilibatkannya aparat RT, RW, dan Lurah. Bila ditelusur dari proses awal, 76,67 persen responden aparat menyatakan bahwa

mereka mengetahui atau mendengar ketika dilakukan sosialisasi pendataan. Namun 53,33 persen menyatakan bahwa aparat tidak dilibatkan dalam penentuan target. Kondisi ini belum menunjukkan kondisi yang optimal, karena tingkat partisipasi aparat pemerintah masih relatif rendah baik dari proses awal sampai ke pencairan. Proses verifikasi membutuhkan peran RT/RW yang sangat besar. Dalam wawancara mendalam terlihat bahwa proses verifikasi tidak optimal karena rapat verifikasi antara RT, RW, kader PKK, tokoh masyarakat dan LPMK cenderung dilakukan secara mendadak, dan di beberapa kelurahan dominasi petugas BPS lebih kuat, sedangkan kelurahan hanya mendampingi saja.

Setelah tahap pendataan maka proses berikutnya adalah pencairan BLT. Proses pencairan BLT ini dapat menimbulkan masalah apabila terdapat ketidakcocokan identitas RTS BLT, adanya kasus penundaan pendistribusian kartu BLT, tidak dilakukannya sosialisasi jadwal sehingga membingungkan warga, sedikitnya loket pencarian BLT, dan ketidakaktifan aparat dalam menyerahkan BLT ke rumah warga untuk warga dengan kasus khusus.

Dari hasil survei terlihat bahwa sebagian besar identitas RTS BLT sama dengan data yang ada, sehingga kondisi ini tidak menimbulkan masalah mendasar dalam pencairan BLT. Di Kota Semarang, kurang lebih 90 persen responden RTS BLT dan 80 persen responden aparat menyatakan bahwa tidak terdapat kasus penundaan pendistribusian kartu BLT, dan jadwal pencairan BLT pun disosialisasikan secara baik. Masalah yang paling dikeluhkan selama pencairan BLT adalah antrean yang terlalu panjang, jumlah petugas di setiap kantor pos yang terlalu sedikit, dan tidak adanya pelayanan keliling untuk warga yang memiliki hambatan khusus.

Meskipun proses pendistribusian BLT telah berjalan sesuai prosedur, namun ketidakpuasan terhadap pendistribusian BLT tetap muncul dalam masyarakat baik dari sisi penerima BLT (52,38 persen responden) maupun dari sisi aparat (86,67 persen). Ketika masih dalam proses penetapan sasaran, maka ketidakpuasan lebih banyak muncul dari sisi aparat (72,67 persen dan 80 persen), karena biasanya mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penetapan dan ketepatan sasaran.

Dalam proses sosialisasi jadwal pencairan, pembagian kartu, pencairan dana maupun pengaduan apabila terjadi masalah, rasa tidak puas lebih sering muncul pada aparat dibandingkan dengan penerima BLT. Penggalan lebih dalam melalui wawancara mendalam menunjukkan bahwa ketua RT dan lurah menjadi merasa tidak puas karena beban pekerjaannya bertambah, dan harus menangani keluhan warga, yang biasanya tidak dapat diselesaikan secara tuntas, karena keterbatasan dana BLT. Dalam wawancara mendalam ini pula terlihat bahwa ketidakpuasan akan berkurang, apabila mereka dilibatkan lebih banyak pada pendataan warga miskin.

Masalah ketidaktepatan sasaran tidak terlalu tinggi di Kota Semarang dan lebih dikarenakan bertambahnya warga miskin dan bukan karena beberapa warga miskin telah menjadi lebih sejahtera. Apabila terjadi ketidaktepatan sasaran karena pemegang kartu meninggal, maka kartu diberikan kepada istrinya, namun apabila tidak terdapat lagi keluarga, maka akan dialihkan ke RTS lain dengan dimusyawarahkan terlebih dahulu di RT atau kelurahan.

Pada dasarnya bentuk ketidakpuasan masyarakat hanya disampaikan dalam bentuk keluhan. Apabila terjadi ketidakpuasan, sebenarnya hal terbaik yang bisa dilayani oleh pemerintah adalah penyediaan posko pengaduan. Menurut responden, pemerintah tidak menginformasikan secara luas cara pengaduan, belum menyediakan posko pengaduan apabila terjadi kesalahan dalam pendistribusian BLT. Akibat dari tidak adanya sosialisasi cara pengaduan dan tidak adanya posko pengaduan yang didirikan secara resmi oleh pemerintah, seluruh ketidakpuasan itu harus ditampung oleh ketua RT, atau naik ke tingkat atasnya yaitu ke Lurah.

Biasanya tindakan yang dilakukan oleh ketua RT dalam menghadapi keluhan warga adalah membuka kembali pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak (62,50 persen), atau menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima BLT pada tahap berikutnya (25 persen), sedangkan kesediaan berbagi dari penerima BLT lain hanya mencapai 12,50 persen. Persentase pada alternatif terakhir ini sangat masuk akal, karena bagaimana pun mereka termasuk masyarakat miskin, yang tidak mungkin dituntut untuk berbagi.

Pemberian BLT pertama kali akan menyentuh aspek perasaan baru kemudian berubah ke tataran yang lebih riil yaitu daya beli. Sebagian besar responden (96,67 persen) menyatakan mereka senang dengan adanya BLT ini, dan 75,83 persen menyatakan bahwa program BLT ini berguna (70 persen responden aparat juga menyatakan hal yang sama). Sebanyak 61,34 persen responden memandang bahwa BLT ini mampu mengurangi beban pengeluaran, namun 87,50 persen menyatakan bahwa mereka tidak mengalami peningkatan daya beli setelah menerima BLT.

Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa program BLT memberikan rasa positif bagi masyarakat yang menerima, mampu mengurangi beban hidup tapi belum dapat meningkatkan daya beli secara optimal. Sebanyak 53,50 persen responden menyatakan uang BLT yang diterima langsung habis dikonsumsi saat itu juga, 32,50 persen menyatakan uang BLT habis dalam waktu 1 bulan, serta 12,50 persen dan 2,50 persen menyatakan habis dalam 1 minggu dan 2 minggu. Hal ini masih jauh dari panjang dampak terjadinya inflasi yang dirasakan masyarakat, karena dampak inflasi di Jawa Tengah memiliki panjang respon selama 2 bulan.

Implikasi dari kondisi ini menunjukkan bahwa nilai BLT yang diberikan kurang mencukupi. Kategori kurang mencukupi dalam hal ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu BLT habis dalam waktu singkat, atau

seharusnya BLT diberikan dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga dampak inflasi akan lebih teredam akibat adanya dana yang bisa meningkatkan daya beli secara berkesinambungan. Hasil ini memperkuat indikasi bahwa BLT belumlah mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Meskipun BLT dipandang belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat, namun 42,50 persen responden RTS BLT tetap menghendaki BLT diberikan dan tidak diganti dengan wujud lain, sedangkan 39,17 persen lebih memilih adanya subsidi dalam bentuk barang seperti misalnya sembako murah, dan 10,83 persen lebih memilih uang sekolah gratis per bulan.

Pro dan kontra mengenai pemberian BLT yang tidak mendidik dan kontraproduktif sampai saat ini masih terjadi di masyarakat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak sampai 50 persen responden yang menyatakan bahwa BLT kontraproduktif, namun sebenarnya masyarakat penerima BLT pun berharap bahwa bantuan yang diterima bukan hanya sekedar bantuan untuk meningkatkan daya beli yang tidak memiliki kesinambungan. Dengan demikian BLT yang lebih bersifat sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM, perlu didukung oleh skema lain yang bersifat *empowering*

Prioritas tertinggi dari penggunaan BLT adalah untuk konsumsi (77,5 persen), membayar keperluan anak sekolah (16,67 persen), disimpan (2,5 persen) dan membayar utang (1,67 persen), sedangkan penggunaan untuk biaya berobat sebesar 0,83 persen dan modal usaha sebesar 0,83 persen. Responden yang menggunakan BLT untuk konsumsi, memprioritaskan pembelian beras dan sembako (92,59 persen), kemudian diikuti dengan pembelian sandang dan bahan bakar.

Survei ini juga dimaksudkan untuk melihat efektivitas penyaluran BLT. Kantor Menko Kesra mendefinisikan tingkat efektivitas penyaluran BLT adalah seberapa jauh BLT dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin penerima bantuan. Survei ini mencoba mendekati ukuran efektivitas dengan menggunakan data penghasilan, pengeluaran, dan nilai konsumsi yang dilakukan oleh responden.

Data penghasilan responden menunjukkan bahwa rata-rata perubahan penghasilan nominal mereka dalam 2 tahun terakhir ini adalah sebesar 2,08 persen. Padahal inflasi Jawa Tengah pada kuartal 1, 2008 sebesar 7,95 persen (yoy). Dengan kenaikan pendapatan nominal rata-rata sebesar 2,08, maka sebenarnya secara riil masyarakat telah mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Bila dilihat dari pengeluaran responden, maka pada tahun 2005 rata-rata pengeluaran per bulan adalah Rp 440.729 dan mengalami kenaikan sebesar 14,71 persen di tahun 2008 menjadi Rp 505.598,00. Bila dilihat dari komponen inflasi, maka kemungkinan terbesar kenaikan pengeluaran RTS BLT berasal dari pengeluaran untuk kebutuhan primer yaitu makan dan sandang.

Kondisi defisit anggaran rumah tangga pada tahun 2005 masih relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2008. Adanya subsidi sebesar Rp 100.000,00 per bulan, atau yang diberikan pada tahap awal sebesar Rp 300.000,00 tampaknya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap defisit anggaran yang dirasakan oleh RTS. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa dana BLT hanya dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Pembelian sembako yang dilakukan oleh responden perbulan meningkat sebesar 14,56 persen pada tahun 2008 menjadi Rp 330.120,00. Responden sebagian besar memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan pribadi. Pengeluaran untuk transportasi umum per RTS cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2005 sebesar 27,78 persen pada 2008 menjadi Rp 102.568,00 per bulan. Sebagian besar dari responden RTS BLT, menyatakan harus mengeluarkan lebih banyak untuk pembelian minyak tanah. Dana BLT pun sebagian dialokasikan untuk menutup pertambahan ini.

Dari beberapa tolok ukur di atas, maka dapat dilihat bahwa lonjakan pengeluaran untuk kebutuhan hidup relatif besar. Pencairan BLT sebesar Rp 100.000,00 per bulan, tampaknya tidak dapat hanya digunakan untuk menutup satu kebutuhan saja, sehingga jumlah ini tetap dinilai kurang.

Bila ukuran efektivitas yang digunakan adalah ukuran yang dikeluarkan oleh Menko Kesejahteraan Rakyat, dimana efektivitas diukur dari pengurangan beban hidup, maka BLT telah mampu mengurangi beban hidup RTS BLT. Namun bila tolok ukur ini dipertanyakan lebih dalam mengenai seberapa besar pengurangannya dan seberapa lama kesinambungannya, maka data-data di atas tampaknya belum menunjukkan efektivitas pemberian BLT berlangsung optimal.

Untuk itu pembenahan penyaluran BLT di masa yang akan datang dapat dimulai dari adanya kriteria kemiskinan yang lebih tepat. Ketika kriteria kemiskinan telah dapat menggambarkan kondisi kemiskinan yang sesungguhnya maka tahap berikutnya adalah pelibatan RT/RW/Lurah baik dalam proses pendataan maupun verifikasi secara lebih banyak. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi bias sasaran, karena bagaimana pun ketua RT/RW/Lurah, merupakan orang yang relatif lebih tahu kondisi warganya. Prosedur pengaduan dan adanya posko pengaduan merupakan hal yang penting untuk dipikirkan karena adanya mekanisme pengaduan yang jelas akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan dapat mengurangi beban yang harus ditanggung oleh ketua RT/RW/Lurah.

Tolok ukur efektivitas program BLT yang dikeluarkan oleh Menko Kesra tampaknya juga perlu diperluas dan dipertajam. Program BLT tidak dapat dikatakan efektif bila hanya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, namun perlu pula dipikirkan panjang dampak yang ditimbulkan dan disertai skema program lain yang tujuannya adalah mengembangkan kemampuan produktif (*empowering*) masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	2
Abstrak	3
Ringkasan eksekutif	4
Daftar Isi	11
Daftar tabel	13
Daftar gambar.....	14
Daftar gambar.....	14
Bab I. Pendahuluan.....	15
1.1. LATAR BELAKANG	15
1.2. TUJUAN	17
1.3. MANFAAT	18
1.4. RUANG LINGKUP.....	18
Bab 2. Metode Penelitian.....	20
2.1. SUBYEK PENELITIAN.....	20
2.2. POPULASI	20
2.3. METODE PENGUMPULAN DATA.....	21
2.3.1. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	21
2.3.2. Pengambilan Sampel.....	21
2.3.3. Kuesioner	22
2.4. Metode Pengolahan Data	22
2.5. Jadwal Penelitian	23
2.6. Tim Peneliti	23
Bab 3. Temuan.....	24
3.1. Kebijakan Bantuan Tunai Langsung.....	24
3.1. Distribusi Responden.....	27
3.3. Kesesuaian Kriteria	28
3.4. Prosedur Pendistribusian BLT	33
3.4.1. Partisipasi Aparat dalam Hal Teknis.....	35
3.4.2. Pelayanan Pencairan BLT di Lapangan.....	36
3.4.3. Hal yang Menghambat di Lapangan.....	38
3.4.4. Syarat Pencairan dan Pungutan Lain	40
3.5. Tingkat Kepuasan Pelayanan	41
3.6. sistem Pengaduan	44
3.7. Dampak ekonomis BLT.....	46
3.8. Penggunaan BLT	51
3.9. indikasi efektivitas dampak blt	52
Bab 4. kesimpulan dan rekomendasi.....	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. rekomendasi	61
Bibliografi 64	
Lampiran 1. perubahan data 2005, 2008.....	65

Lampiran 2. daftar pertanyaan..... 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai Kota Semarang	20
Tabel 2.2. Proporsi Sampel	21
Tabel 3.1. Distribusi Responden Menurut Kecamatan	27
Tabel 3.2. Karakteristik Responden	28
Tabel 3.3. Kriteria Kemiskinan	29
Tabel 3.4. Penghasilan Responden.....	30
Tabel 3.5. Rata-Rata Penghasilan Responden per Bulan (dalam Rp)	31
Tabel 3.6. Kesesuaian Kriteria.....	32
Tabel 3.7. Sosialisasi, Penentuan Target dan Koordinasi	35
Tabel 3.8. Proses Pelayanan Pencairan BLT di Lapangan.....	37
Tabel 3.9. Informasi Keluarga Miskin di 10 Kecamatan	38
Tabel 3.10. Pembatalan Kartu BLT	39
Tabel 3.11. Faktor yang Menghambat Penyaluran BLT	39
Tabel 3.12. Syarat Pencairan dan Pungutan Lain.....	40
Tabel 3.13. Potongan Lain dalam Pencairan BLT	41
Tabel 3.14. Tingkat Kepuasan Pelayanan	42
Tabel 3.15. Ketidaktepatan Sasaran.....	43
Tabel 3.16. Sistem Pengaduan	44
Tabel 3.17. Cara Penanganan Pengaduan.....	45
Tabel 3.18. Persepsi atas Dampak BLT	46
Tabel 3.19. Jangka Waktu Pemanfaatan BLT.....	47
Tabel 3.20. Alternatif Bentuk Subsidi	48
Tabel 3.21. Jumlah BLT yang Diinginkan.....	48
Tabel 3.22. Persepsi atas Ketidakmanfaatan BLT	49
Tabel 3.23. Penggunaan dana BLT	51
Tabel 3.24. Prioritas Konsumsi	52
Tabel 3.25. Pengeluaran Responden per Bulan (dalam Rp)	54
Tabel 3.26. Pembelian Sembako per Responden (dalam Rp).....	55
Tabel 3.27. Pembelian Bensin per Responden (dalam Rp)	56
Tabel 3.28. Pengeluaran Transportasi Umum per Responden (dalam Rp)	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Kota Semarang.....	19
Gambar 3.1. Skema Penyaluran BLT kepada RTS.....	34
Gambar 3.2. Rata-Rata Penghasilan Responden per Bulan.....	53
Gambar 3.3. Selisih Penghasilan dan Pengeluaran Responden per Bulan ..	54
Gambar 3.4. Pembelian Minyak Tanah per Responden	57
Gambar 3.5. Pengeluaran untuk Berobat per Responden	58

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak krisis ekonomi terjadi pada pertengahan 1997 hingga sekarang, beban anggaran pemerintah semakin berat. Beban pemerintah juga menjadi semakin berat akibat kenaikan harga minyak dunia yang jauh dari asumsi pemerintah. Pada APBN tahun 2006, pemerintah mengasumsikan harga minyak dunia sebesar 57 dolar AS per barel, tetapi kenyataannya harga minyak dunia mencapai 130 dolar AS per barel. Kenaikan harga minyak dunia tersebut tentu saja berdampak pada meningkatnya anggaran belanja pemerintah terutama pada pos subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kondisi ini menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah terus menerus defisit. Pada tahun 2008 pemerintah menargetkan dapat menekan defisit anggaran tersebut menjadi nol (*zero deficit*). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran rutin. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah secara berkala adalah mengupayakan pengurangan atau penurunan subsidi BBM melalui peningkatan harga jual BBM di dalam negeri. Kebijakan penurunan subsidi BBM yang konsekuensinya menaikkan harga BBM memang bukan kebijakan yang populer, tetapi kebijakan tersebut tidak bisa dihindarkan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi pengaruh kenaikan harga BBM terhadap rumah tangga miskin. Kenaikkan harga BBM selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai karena dampaknya yang sangat luas, tidak hanya berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi persoalan politik. Namun demikian, bukan mengabaikan

pentingnya kajian mengenai dampak kenaikan BBM, kajian mengenai BLT juga menjadi penting karena banyak pihak yang meragukan efektivitasnya.

Sebagaimana diketahui, pendataan untuk keperluan BLT telah dilakukan pada tahun 2005 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan tersebut memang dilakukan untuk mendapatkan data rumah tangga miskin, yang nantinya akan diberikan BLT dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2005. Program BLT tahun 2008 sebagai salah satu solusi meminimalkan dampak kenaikan harga BBM dengan memberikan subsidi langsung bagi rakyat miskin, juga didasarkan pada data BPS tahun 2005. Dalam pandangan banyak pihak, data tersebut tentu saja kurang menggambarkan kondisi saat ini yang sesungguhnya, karena selama tiga tahun pasti sudah banyak terjadi perubahan data rakyat miskin.

Berbagai pandangan yang muncul di publik antara lain juga menilai bahwa BLT merupakan program yang banyak ruginya dibanding manfaat. Bantuan Rp100.000,00 per bulan seolah tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan hidup sebagai akibat kenaikan harga BBM. Beberapa berita yang muncul di media massa juga memperlihatkan berbagai potret kehidupan masyarakat di sekitar penyaluran BLT. Misalnya, penyaluran BLT di beberapa daerah diberitakan justru mengakibatkan rakyat makin menderita, terjadi anarki karena ada masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan BLT tetapi tidak mendapatkannya, ada juga foto yang menggambarkan seorang nenek digendong karena tidak bisa jalan untuk menerima BLT, atau ada juga berita tentang kepala desa yang menolak program BLT. Menyimak pemberitaan yang dilakukan di media massa mengenai BLT, timbul berbagai pertanyaan seputar BLT dan efektivitasnya, serta apakah media massa benar-benar menyampaikan berita secara apa adanya dan komprehensif.

Pada saat program BLT dilaksanakan pada tahun 2005, Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial mengungkapkan bahwa efektivitas pemberian BLT di Jakarta sebagai kompensasi dari pemotongan

subsidi BBM hanya mencapai 54,96 persen. Kantor Menko Kesra mendefinisikan tingkat efektivitas adalah seberapa jauh BLT dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin penerima bantuan. Pemantauan BLT pada tahun 2005 juga telah dilakukan oleh 56 perguruan tinggi dan lima organisasi, yakni NU, HKTI, PGRI, PKK, dan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh 33 provinsi pada bulan Oktober hingga November 2005, antara lain menemukan bahwa sekitar 45 persen rumah tangga miskin penerima BLT tidak merasakan bantuan itu meringankan beban pengeluaran mereka yang semakin berat akibat kenaikan harga BBM. Pemantauan yang sama juga menunjukkan ketepatan sasaran BLT mencapai 90,26 persen dan ketepatan jumlah bantuan yang diterima berkisar 88 persen (Kompas, 11 Maret 2006).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Kantor Bank Indonesia Semarang memandang perlu dilakukan kajian mengenai efektivitas program BLT di kota Semarang, yang diharapkan dapat mempresentasikan pelaksanaan BLT di Jawa Tengah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah (pusat dan daerah) dan juga Kantor Pusat Bank Indonesia, dalam memformulasikan kebijakan ekonomi ke depan.

1.2. TUJUAN

Survei ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis persepsi masyarakat penerima BLT di kota Semarang terhadap efektivitas penyaluran BLT.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis persoalan di sekitar penyaluran BLT di kota Semarang.

- c. Menganalisis berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam memperbaiki mekanisme penggantian subsidi kepada masyarakat miskin sebagai akibat kenaikan harga BBM.

1.3. MANFAAT

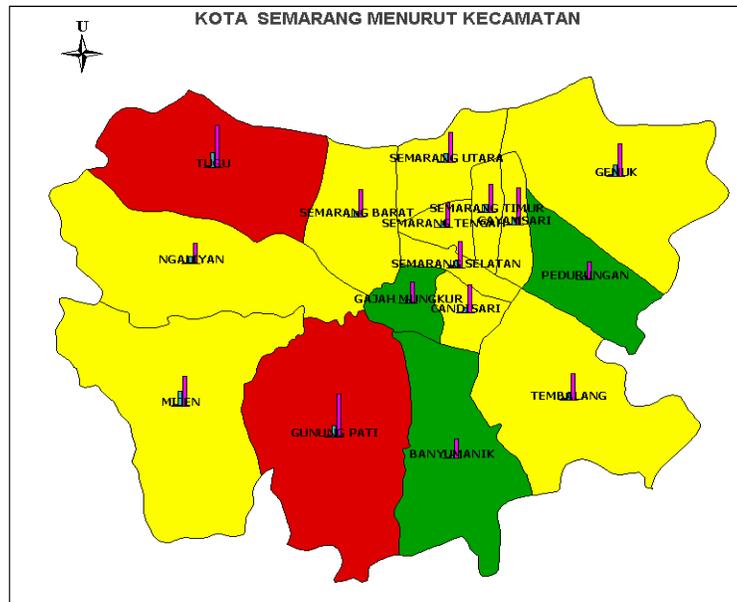
Survei ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kondisi aktual yang ada di masyarakat, terutama masyarakat yang menerima BLT dan aparat yang terkait dengan penyaluran BLT. Deskripsi dan analisis mengenai efektifitas penyaluran BLT dan dampak ekonomisnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambil keputusan mengenai bentuk subsidi yang seharusnya diberikan, serta sistem dan mekanisme penyaluran subsidi secara lebih tepat.

1.4. RUANG LINGKUP

Dengan memperhatikan tujuan survei tersebut, maka ruang lingkup pekerjaan kajian meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis persepsi masyarakat penerima BLT di kota Semarang terhadap efektifitas penyaluran BLT dan dampaknya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis persoalan di sekitar penyaluran BLT di kota Semarang
- c. Menganalisis berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam memperbaiki mekanisme penggantian subsidi kepada masyarakat miskin sebagai akibat kenaikan harga BBM.
- d. Melaporkan dan mendiskusikan pelaksanaan pekerjaan dengan Bank Indonesia.
- e. Menyusun dan menyampaikan hasil survei kepada Bank Indonesia tepat waktu.

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Semarang yang terdiri dari 16 Kecamatan, meliputi 177 kelurahan masyarakat kota Semarang.



Gambar 1.1. Peta Kota Semarang

BAB 2. METODE PENELITIAN

2.1. SUBYEK PENELITIAN

Subyek penelitian ini adalah masyarakat penerima BLT dan aparat yang terkait dengan penyaluran BLT

2.2. POPULASI

Populasi dalam survei ini adalah seluruh masyarakat penerima BLT yang tersebar di 17 kecamatan di Kota Semarang, dengan rincian data sebagai berikut.

Tabel 2.1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai Kota Semarang

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		BLT	SM	M	HM
1	GAYAM SARI	4922	136	811	3975
2	TUGU	2631	85	686	1860
3	NGALIYAN	4975	163	1242	3570
4	MIJEN	4112	184	1329	2599
5	GUNUNG PATI	6246	231	1333	4682
6	BANYUMANIK	4449	47	594	3808
7	PEDURUNGAN	5616	115	996	4505
8	GENUK	5486	229	1354	3903
9	CANDISARI	4304	65	735	3504
10	GAJAH MUNGKUR	2263	20	329	1914
11	SEMARANG TENGAH	3728	99	781	2848
12	SEMARANG UTARA	8186	282	1831	6073
13	SEMARANG BARAT	8259	141	1402	6716
14	TEMBALANG	7893	495	1551	5847
15	SEMARANG SELATAN	4399	320	925	3154
16	SEMARANG TIMUR	5196	147	1147	3902
TOTAL		82.665	2.759	17.046	62.860

Sumber : Sistem Informasi Geografis Kemiskinan Indonesia, 2005.

Keterangan : SM : Sangat Miskin, M: Miskin, HM: Hampir Miskin

2.3. METODE PENGUMPULAN DATA

2.3.1. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam survei ini adalah:

- a. Data primer, yaitu melalui wawancara mendalam dan mengedarkan kuesioner kepada masyarakat kota Semarang.
- b. Data sekunder, yaitu dokumen dan data yang terkait dengan kajian ini.

2.3.2. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara *proporsional random sampling* terhadap populasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) BLT dan aparat yang terkait dengan penyaluran BLT. Kecamatan yang dipilih dalam sampel ditetapkan berdasarkan 10 kecamatan yang menerima BLT terbanyak.

Jumlah sampel yang diambil diharapkan sebanyak 150 sampel. Sampel dibedakan menjadi 2 dengan proporsi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penerima BLT: 120 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.2. Proporsi Sampel

NO	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	BLT	PROPORSI
1	SEMARANG BARAT	8259	16
2	SEMARANG UTARA	8186	16
3	TEMBALANG	7893	15
4	GUNUNG PATI	6246	12
5	PEDURUNGAN	5616	11
6	GENUK	5486	11
7	SEMARANG TIMUR	5196	10
8	NGALIYAN	4975	10
9	GAYAM SARI	4922	10
10	BANYUMANIK	4449	9
Jumlah		61228	120

- b. Aparat yang terkait dengan penyaluran BLT : 30 orang, dengan rincian masing-masing kecamatan 3 Ketua RT.
- c. Aparat tingkat Kelurahan, 10 orang Lurah akan dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*)
- d. 2 orang pakar akan dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*). Pakar yang dipilih dalam wawancara mendalam adalah Bapak Ngargono, Ketua LP2K, sebagai representasi dari LSM yang memiliki fokus pada perlindungan konsumen/masyarakat dan Bagian Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Kota Semarang, sebagai representasi pemerintah.

2.3.3. Kuesioner

Struktur dan sistematika kuesioner berisi beberapa pertanyaan yang bersifat kualitatif berupa penilaian dan harapan responden mengenai pelaksanaan dan manfaat BLT. Kuesioner lengkap terlampir dalam lampiran 2.

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Instrumen kuesioner tersebut dibagikan oleh petugas lapangan yang didampingi oleh aparat pemerintah setempat untuk diisi oleh masing-masing responden yang memenuhi persyaratan dalam survei ini.

2.4. Metode Pengolahan Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui analisis ini data yang dikumpulkan dikritisi dan distrukturkan alur pembahasannya sehingga menghasilkan suatu analisis yang lebih sistematis dan komprehensif.

2.5. Jadwal Penelitian

Penelitian ini merupakan *rapid survey* yang dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Ada pun jadwal penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

NO	KETERANGAN	BULAN JUNI																		
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Proposal	■																		
2	Rekrutment Enumerator		■	■																
3	Training Enumerator				■															
4	Pengumpulan Data					■	■	■	■	■										
5	Indepth Interview					■	■													
6	Transkrip Indepth							■	■	■										
7	Tabulasi								■	■	■	■								
8	Analisis Data								■	■	■	■	■							
9	Draft Laporan Akhir													■	■					
10	Review																■	■		
11	Final Report																		■	■

2.6. Tim Peneliti

Peneliti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen (P3M) yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, terdiri dari Dr. A. Ika Rahutami, MSi, Widuri Kurniasari, SE, MSi, Drs. Y. Sugiharto, MM dan Meniek Sringing Prapti, SE, MSi. Pengumpulan data di lapangan tim peneliti dibantu oleh 8 orang surveyor.

BAB 3. TEMUAN

Pemberian BLT diketahui oleh 89,08 persen responden RTS BLT merupakan bentuk kompensasi dari kenaikan harga BBM. Pengetahuan ini merupakan awal yang baik dari suatu persepsi, karena sejak awal BLT dimaksudkan untuk menaikkan daya beli masyarakat yang turun akibat kenaikan harga BBM. Pengetahuan mengenai kompensasi BBM ini saja tidak cukup. Seperti termuat dalam banyak pemberitaan, pencairan dana BLT masih tetap saja menimbulkan pro dan kontra, serta keluhan-keluhan masyarakat dan aparat. Pro dan kontra lebih menyoroti fungsi BLT yang dipandang tidak mendidik, dan seharusnya diberikan dalam alternatif lain. Keluhan-keluhan yang muncul dalam berbagai media melihat masalah ketidaktepatan sasaran RTS BLT, dan proses pencairan yang dipandang kurang optimal.

Survei ini menganalisis temuan dari dua sisi, yaitu dari sisi masyarakat penerima BLT dan sisi aparat yang terlibat dalam proses pencairan BLT 2008. Temuan ini juga akan dikomparasi dengan perundangan dan prosedur terkait, agar diperoleh hasil yang obyektif dan komprehensif.

3.1. KEBIJAKAN BANTUAN TUNAI LANGSUNG

Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008 diberikan berdasarkan Instruksi Presiden No 3 tahun 2008 kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Yang dimaksud dengan RTS adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin.

BLT diberikan dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM (Departemen Sosial, 2008) dengan tujuan sebagai berikut.

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

BLT diberikan dengan pertimbangan bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang paling rentan, dan akan terkena dampak sosial yang paling besar. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan taraf kesejahteraannya semakin menurun atau menjadi semakin miskin. Menyikapi hal ini pemerintah merasa perlu untuk memberikan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (*compensatory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau program jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Pada dasarnya BLT merupakan bagian dari skema utuh pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Skema itu dapat dibagi dalam bentuk Bantuan Perlindungan Sosial Rumah Tangga Miskin, pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Bantuan Perlindungan Sosial Rumah Tangga Miskin terdiri dari (i) Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada 19,1 juta RTS, (ii) Program Keluarga harapan (PKH), (iii) Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) senilai Rp 4,2 triliun, (iv) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (v) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan (vi) Bantuan Sosial Korban Bencana, Penyandang cacat dan Lansia. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sedangkan Penguatan UMK dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp 5 juta, tanpa agunan.

Pada tahun 2008, pemerintah melanjutkan skema program PKPS BBM dari bulan Juni sampai dengan Desember 2008 dalam bentuk BLT tanpa syarat kepada RTS (*unconditional cash tranfer*) sebesar Rp 100.000,00 per bulan selama 7 bulan, dengan rincian diberikan Rp 300.000,00/3 bulan (Juni-Agustus) dan Rp 400.000,00/4 bulan (September-Desember) (Departemen Sosial, 2008)

Pemberian BLT kepada RTS sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini akan berakhir pada 31 Desember 2008. Pelaksana Inpres Nomor 3 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

- a. Menko Polhukam
- b. Menko Perekonomian
- c. Menko Kesra
- d. Menteri Keuangan
- e. MenPPN/Ka. Bappenas
- f. Menteri Sosial
- g. Menteri Dalam Negeri
- h. Menkominfo
- i. Meneg BUMN
- j. Jaksa Agung
- k. Panglima TNI
- l. Kapolri
- m. Kepala BPS
- n. Kepala BPKP
- o. Gubernur
- p. Bupati/Walikota

Pada tahap awal, BPS memiliki peran besar karena harus menyediakan data RTS BLT 2008 bersama Pemerintah Kabupaten/Kotal. Data dasar yang digunakan adalah data basis RTS BLT 2005/2006 (keadaan 31 Mei 2006) sebanyak 19.100.905 RTS. Pemutakhiran data melalui verifikasi pada 1.023 kecamatan di 97 kabupaten/kota di 15 provinsi wilayah ujicoba Program Keluarga Harapan (PKH) (keadaan 31 Desember 2007). Kota Semarang juga telah melakukan verifikasi data, dan akan terselesaikan pada semua kecamatan sekitar September 2008.

Kota Semarang menjadi daerah yang pertama kali mendapatkan BLT Jawa Tengah 2008. Mengacu data BPS Jawa Tengah tahun 2006, jumlah penerima BLT di Semarang adalah 82.665 kepala keluarga (KK) dari total

3.171.201 Rumah Tangga Miskin (RTM). Mekanisme pencairan BLT masih sama dengan mekanisme yang sebelumnya yaitu RTS BLT datang ke kantor pos. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Haris dari bagian Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Kota Semarang, maka diperoleh informasi bahwa dari 82.665 RTS, baru 70.148 RTS yang melakukan pencairan pada bulan Juni 2008. Pemerintah Kota Semarang, berniat untuk mengajukan kembali permohonan kuota kemiskinan baru sehingga mencapai 90.641 RTS, mengingat bertambahnya masyarakat miskin di Kota Semarang.

3.1. DISTRIBUSI RESPONDEN

Seperti dikemukakan dalam metode penelitian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 120 RTS BLT dan 30 ketua RT yang tersebar dalam 10 kecamatan yang terpilih.

Tabel 3.1. Distribusi Responden Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	RTS BLT		Aparat RT	
		Frek	%	Frek	%
1	Semarang Timur	10	8,33	3	0,10
2	Gayamsari	10	8,33	3	0,10
3	Pedurungan	11	9,17	3	0,10
4	Genuk	11	9,17	3	0,10
5	Tembalang	15	12,50	3	0,10
6	Gunung pati	12	10,00	3	0,10
7	Banyumanik	9	7,50	3	0,10
8	Semarang Utara	16	13,33	3	0,10
9	Semarang Barat	16	13,33	3	0,10
10	Ngaliyan	10	8,33	3	0,10
	Jumlah	120	100,00	30	100,00

Sumber : Data survei

Karakteristik responden RTS BLT menunjukkan bahwa 52,50 persen bekerja dalam kategori lain-lain karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, atau berwiraswasta seperti berdagang di pasar, kaki lima, dan ber

45,83 persen bekerja sebagai buruh harian, dan 1,67 persen adalah pensiunan.

Tabel 3.2. Karakteristik Responden

Kriteria	Jawaban	Frek	%
Jumlah tanggungan dalam keluarga	<5	112	98,25
	5 - 7 ORG	2	1,75
	> 7	0	-
Pekerjaan	Karyawan swasta	0	-
	Harian/buruh	55	45,83
	pensiunan	2	1,67
	lain-lain	63	52,50

Sumber: Data survei

RTS BLT sebagian besar (98,25 persen)¹ memiliki tanggungan keluarga kurang dari 5 orang (yang biasanya terdiri dari istri dan anak-anak), dan hanya 1,75 persen yang memiliki tanggungan antara 5 sampai 7 orang (selain keluarga inti, mereka juga harus menanggung saudara yang lain).

3.3. KESESUAIAN KRITERIA

Di luar pro dan kontra masalah tepat tidaknya kompensasi BBM diberikan dalam bentuk BLT, maka masalah yang paling sering muncul dalam proses pencairan BLT ini adalah ketepatan RTS BLT dengan kriteria kemiskinan dan pelaksanaan pencairan BLT di lapangan. Masalah kemiskinan memang bukanlah masalah yang mudah, karena masalah kemiskinan bukan saja masalah ketepatan ukuran numerik namun juga masalah persepsi. Ukuran-ukuran numerik akan mengukur kesejahteraan seseorang sehingga dapat digolongkan dalam kelompok sangat miskin, miskin dan hampir miskin.

Ukuran-ukuran numerik kemiskinan berkaitan dengan yang disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah besaran penghasilan per

¹ Prosentase jawaban didasarkan pada jumlah jawaban yang valid.

orang yang digunakan untuk mengkategorikan miskin tidaknya seseorang. Ada berbagai macam definisi garis kemiskinan, mulai dari pendekatan US\$1-PPP (*purcashing power parity*)/kap/hari (versi MDGs) atau US\$2-PPP/kap/hari (versi Bank Dunia), sampai ke pendekatan penghasilan yang dibutuhkan untuk memungkinkan konsumsi sebesar 2.100 kalori per orang. Definisi kemiskinan yang dikeluarkan secara resmi oleh BPS Indonesia adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori dan beberapa kebutuhan dasar non makanan lainnya (atau disebut dengan pendekatan *human basic needs*).

Tabel 3.3. Kriteria Kemiskinan

Variabel kemiskinan	Kriteria
Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8 m ²
Jenis lantai rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
Sumber air minum	Bukan air bersih
Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART	Tidak
Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak
Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani gurem, nelayan, pekebun dengan penghasilan dibawah Rp 600.000,00 per bulan
Pendidikan kepala rumah tangga	Belum pernah sekolah/tidak taman SD
Kepemilikan aset barang berharga/tabungan minimal Rp 500.000,-	Tidak ada

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selain definisi *human basic needs* tersebut di atas, maka berdasarkan kriteria BPS, variabel yang menentukan kemiskinan dibedakan menjadi 2 yaitu variabel moneter yang didasarkan pada besarnya pengeluaran, dan variabel non moneter. Seluruh variabel ini terangkum dalam 14 kriteria. Dari ke-14 kriteria inilah maka masyarakat akan

digolongkan dalam 3 kategori yaitu hampir miskin, miskin dan sangat miskin.

Golongan sangat miskin adalah yang memenuhi ke 14 kriteria diatas Kelompok miskin adalah kelompok yang hanya memenuhi antara 11 sampai 13 kriteria. Sementara yang memenuhi 9 sampai 10 kriteria adalah disebut mendekati miskin dan apabila hanya memenuhi kurang dari 8 kriteria tidak termasuk keluarga miskin. Penerima BLT adalah yang memenuhi unsur 9-14 kriteria.

Tabel 3.4. Penghasilan Responden

Penghasilan	Frek	%
tidak tetap	26	21,67
< 500.000	64	53,33
500.000 - 700.000	18	15,00
> 700.000	12	10,00

Sumber : data survei

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan sebagian besar responden memiliki pekerjaan tidak tetap, berusaha sendiri atau menjadi buruh harian. Dari 120 responden, hanya 94 responden yang mampu menjawab penghasilan rata-rata per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa 26 (21,67 persen) responden lainnya tidak mampu menghitung penghasilan mereka per bulan, karena penghasilannya sangat tidak pasti.

Responden yang menyatakan penghasilannya kurang dari Rp 500.000,00 adalah 53,33 persen, yang berpenghasilan antara Rp 500.000,00 - Rp 700.000,00 sebesar 15 persen, dan yang berpenghasilan di atas Rp 700.000,00 sebesar 10 persen (12 orang). Penghasilan rata-rata responden adalah Rp 467.553,00 pada tahun 2005 dan Rp 477.287 pada tahun 2008. Bila melihat indikasi ini maka secara penghasilan, responden memiliki penghasilan dibawah Rp 600.000,00 seperti yang disyaratkan dalam kriteria kemiskinan.

Tabel 3.5. Rata-Rata Penghasilan Responden per Bulan (dalam Rp)

Ukuran	2005	2008	%
Rata-rata	467.553	477.287	2,08
Nilai paling sering muncul	500.000	500.000	
Minimum	150.000	150.000	
Maksimum	1.800.000	1.500.000	
Jumlah responden	94	94	

Sumber : data survei

Bila data penghasilan dilihat lebih dalam, maka akan terlihat bahwa nilai penghasilan yang paling sering muncul adalah Rp 500.000,00 (masih di bawah kriteria kemiskinan), namun nilai maksimum penghasilan pada tahun 2005 adalah Rp 1.800.000,00 dan tahun 2008 adalah Rp 1.500.000,00. Nilai maksimum ini memberikan sedikit indikasi bahwa ada ketidaktepatan sasaran bila dilihat dari sisi penghasilan.

Ketepatan sasaran RTS BLT tidak dapat dilihat hanya dari sisi penghasilan saja, karena BPS mengeluarkan 13 kriteria yang lain. Hasil survei menunjukkan bahwa 89,17 persen responden menyatakan mengkonsumsi daging atau telur atau ikan atau ayam kurang dari 2 kali dalam satu bulan dan 10,83 persen menyatakan mengkonsumsi 3 - 5 kali dalam satu bulan. Bila kriteria ini dibandingkan dengan kriteria yang dikeluarkan oleh BPS, yaitu ketidakmampuan membeli daging atau susu atau ayam dalam seminggu, maka terlihat kenyataan bahwa RTS BLT tidaklah seburuk yang dikriteriakan oleh BPS.

Kriteria kepemilikan yang distandarkan oleh BPS pun, tampaknya tidak sepenuhnya pas ketika berada di lapangan. Sebanyak 53,33 persen responden menyatakan memiliki jamban di dalam rumah (artinya memiliki jamban sendiri, dan bukan WC umum), 62,71 persen memiliki televisi, dan 89,17 persen menyatakan memiliki listrik, dengan daya sebagian besar adalah 450 watt. Hasil survei ini mengindikasikan adanya penyimpangan di lapangan terhadap kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS. Kondisi di lapangan yang sesuai dengan kriteria kemiskinan BPS adalah rumah tangga

tidak memiliki lantai keramik (91,67 persen) dan tidak memiliki sepeda motor (90,83 persen).

Tabel 3.6. Kesesuaian Kriteria

Kriteria	Jawaban	Frek	%
Menurut perasaan anda, bagaimanakah kesejahteraan keluarga ini selama setahun terakhir	Kurang sejahtera	85	70,83
	Cukup sejahtera	35	29,17
	Sangat sejahtera	0	-
Berapa kali seminggu keluarga ini mengkonsumsi daging atau telur atau ikan atau ayam selama sebulan terakhir	≤ 2 kali	107,00	89,17
	3 - 5 kali	13,00	10,83
	> 6 kali	-	-
Berapa kali seminggu keluarga ini mengkonsumsi sayur atau buah selama sebulan terakhir	≤ 2 kali	76,00	63,33
	3 - 5 kali	43,00	35,83
	> 6 kali	1,00	0,83
Kepemilikan jamban di dalam rumah	Ya	64,00	53,33
	Tidak	56,00	46,67
Kepemilikan lantai keramik	Ya	10,00	8,33
	Tidak	110,00	91,67
Kepemilikan Sepeda motor	Ya	11	9,17
	Tidak	109	90,83
Kepemilikan Kulkas/TV	Ya	74	62,71
	Tidak	44	37,29
Kepemilikan Listrik	Tidak	3	2,50
	Ya, Tapi Rusak	10	8,33
	Ya dan Berfungsi	107	89,17
Berapa daya listrik di rumah anda	450 watt	112	93,33
	900 watt	8	6,67
	> 1300 watt	0	-

Sumber : data survei

Ketidaktepatan sasaran akibat ketidaksesuaian kriteria ini, menurut Nargono, pakar yang digunakna dalam wawancara mendalam telah muncul sejak tahun 2005. Surveyor BPS saat ini tidak terlalu berhasil karena tidak mengikut sertakan secara penuh perangkat di tingkat desa. Surveyor di lapangan juga dinilai cenderung untuk bersifat subyektif. Sedangkan dari sisi 14 indikator yang digunakan, pendataan tidak dilakukan dengan *scoring* sehingga mendorong untuk melakukan justifikasi yang subyektif

Di luar ukuran yang telah diberikan oleh BPS mengenai kriteria miskin, secara perilaku kemiskinan dan kesejahteraan adalah masalah

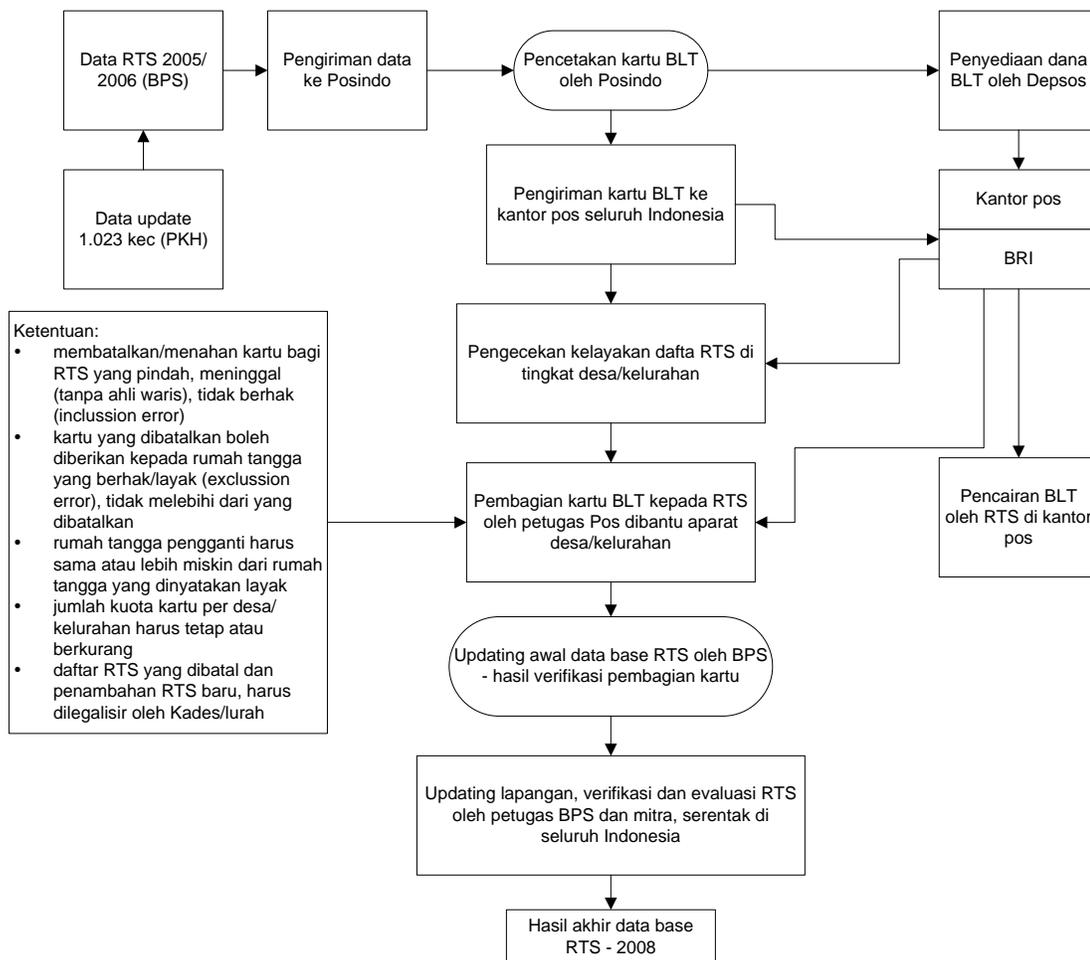
persepsi. Terdapat orang yang secara numerik sejahtera namun merasa dirinya miskin dan sebaliknya. Secara persepsi 70,83 persen responden menyatakan kurang sejahtera dalam satu tahun terakhir, sedangkan 29,17 persen menyatakan cukup sejahtera.

Ketidaktepatan kriteria RTS BLTS antara yang distandarkan oleh BPS dengan kondisi di lapangan, mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah memang terjadi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran yang sesuai dengan kriteria kemiskinan BPS, dan atau yang kedua adalah kriteria miskin itu sendiri yang perlu dipertimbangkan ulang. Beberapa Lurah dalam wawancara mendalam juga menyoroti hal yang sama. Mereka menyatakan bahwa pada saat ini televisi, jamban, listrik sudah bukan barang mewah lagi, terlebih di perkotaan. Sehingga keluarga yang memiliki televisi, jamban maupun listrik tidak selalu dimasukkan dalam kategori tidak miskin, karena mungkin dari sisi penghasilan, masyarakat tersebut masih masuk dalam garis kemiskinan.

Kriteria yang ditetapkan BPS dan kondisi di lapangan, terkadang memerlukan justifikasi yang benar-benar tepat. Karena bila didasarkan variabel moneter maka termasuk kategori miskin, namun ketika dinilai dari tanda-tanda fisik maka terdapat kemungkinan telah keluar dari garis kemiskinan. Hasil wawancara mendalam juga menunjukkan bahwa petugas lapangan pendataan keluarga miskin perlu dipilih yang jujur, tegas dan disiplin, hal ini terutama untuk menghindari terjadinya *individual judgment* akibat kriteria yang ambigu.

3.4. PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN BLT

Prosedur pendistribusian BLT merupakan kesepakatan bersama antara badan-badan yang terlibat dalam pencairan BLT.



Sumber : Badan pusat Statistik

Gambar 3.1. Skema Penyaluran BLT kepada RTS

Berdasarkan data mekanisme pembagian BLT yang dikeluarkan oleh BPS, maka terlihat jelas bahwa pencairan BLT 2008, tidak dimulai dengan pendataan RTS baru, namun masih menggunakan data lama, yang kemudian diverifikasi pada masing-masing daerah. Secara prosedur, verifikasi tersebut dilakukan oleh petugas BPS dengan didampingi oleh RT/RW setempat, yang dipandang lebih tahu masalah dan kondisi masyarakat sebenarnya. Setelah dilakukan verifikasi maka data dikirim ke Posindo untuk dibuatkan kartu BLT, yang disebut Kartu Kompensasi BBM (KKB). Tahapan berikutnya adalah pengecekan kelayakan daftar RTS di

tingkat desa/kelurahan, dan dilanjutkan dengan pembagian kartu BLT. Proses diakhiri dengan pencairan BLT oleh RTS di kantor pos. Secara sistematis prosedur pencairan BLT tertera dalam skema berikut ini.

3.4.1. Partisipasi Aparat dalam Hal Teknis

Hal yang paling sering dikeluhkan dalam proses pencairan BLT 2008 ini adalah kurang dilibatkannya aparat RT, RW, dan Lurah. Bila ditelusur dari proses awal, 76,67 persen responden aparat menyatakan bahwa mereka mengetahui atau mendengar ketika dilakukan sosialisasi pendataan. Namun 53,33 persen menyatakan bahwa aparat tidak dilibatkan dalam penentuan target. Hal ini dapat dimengerti karena pencairan BLT 2008 ini menggunakan data kemiskinan yang disusun di tahun 2005, sehingga besar kemungkinan ketua RT tidak terlibat dalam penentuan target. Ketidakterlibatan ini bisa disebabkan karena ketua RT pada tahun 2005 belum menjabat, atau proses verifikasi data 2005, yang dilaksanakan secara cepat dan belum mengenai seluruh kecamatan di Kota Semarang², sehingga tidak memungkinkan pelibatan ketua RT secara baik. Separuh dari responden menyatakan bahwa ada koordinasi petugas di lapangan, namun separuhnya menyatakan tidak. Kondisi ini belum menunjukkan kondisi yang optimal, karena tingkat partisipasi aparat pemerintah masih relatif rendah baik dari proses awal sampai ke pencairan.

Tabel 3.7. Sosialisasi, Penentuan Target dan Koordinasi

Kriteria	Jawaban	Frekuensi	%
Adanya sosialisasi pendataan	Ya	23	76,67
	Tidak	7	23,33
Pelibatan aparat dalam penentuan target	Ya	14	46,67
	Tidak	16	53,33
Adanya koordinasi petugas di lapangan	Ya	15	50,00
	Tidak	15	50,00

Sumber : data survei

² Bulan September 2008, diharapkan verifikasi di seluruh kecamatan sudah terlaksana.

Proses verifikasi yang dapat dilakukan adalah melihat apakah terdapat perubahan data masyarakat dengan kategori miskin antara tahun 2005 dan 2008. Ketua RT dan petugas melakukan verifikasi di lapangan dan hasil verifikasi diajukan melalui kelurahan. Data-data yang memerlukan verifikasi diputuskan dalam rapat RT, RW, LMK dan tokoh masyarakat. Di lapangan terjadi beberapa modifikasi pengambilan keputusan. Misalnya RTS BLT telah meninggal, maka dialihkan langsung ke istrinya, namun apabila tidak memiliki keluarga maka akan diserahkan kembali ke RT untuk diputuskan dan dibawa ke kelurahan.

Dalam proses ini terlihat peran RT/RW sangat besar dalam pengambilan keputusan verifikasi. Dalam wawancara mendalam terlihat bahwa proses verifikasi tidak optimal karena rapat verifikasi antara RT, RW, kader PKK, tokoh masyarakat dan LPMK cenderung dilakukan secara mendadak, dan di beberapa kelurahan dominasi petugas BPS lebih kuat, sedangkan kelurahan hanya mendampingi saja. Rapat yang mendadak, dan jangka waktu verifikasi yang sempit menyebabkan petugas dan ketua RT tidak dapat menimbang ulang kondisi warga, apakah terjadi perubahan atau tidak. Dominasi petugas BPS yang kurang melibatkan ketua RT, juga menimbulkan masalah salah sasaran.

3.4.2. Pelayanan Pencairan BLT di Lapangan

Setelah tahap pendataan maka proses berikutnya adalah pencairan BLT. Proses pencairan BLT ini dapat menimbulkan masalah apabila terdapat ketidakcocokan identitas RTS BLT, adanya kasus penundaan pendistribusian kartu BLT, tidak dilakukannya sosialisasi jadwal sehingga membingungkan warga, sedikitnya loket pencarian BLT, dan ketidaktifan aparat dalam menyerahkan BLT ke rumah warga untuk warga dengan kasus khusus.

Tabel 3.8. Proses Pelayanan Pencairan BLT di Lapangan

Kriteria	Jawaban	Penerima		Aparat	
		Frek	%	Frek	%
Adanya ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum	Ya	2	1,67	5	16,67
	Tidak	118	98,33	25	83,33
Adanya kasus penundaan pendistribusian kartu BLT	Ya	11	9,17	6	20,00
	Tidak	109	90,83	24	80,00
Pelaksanaan sosialisasi jadwal	Ya	111	92,50	25	83,33
	Tidak	9	7,50	5	16,67
Loket pencairan yang mencukupi pelayanan	Ya	80	66,67	6	20,00
	Tidak	40	33,33	24	80,00
Keaktifan aparat dalam menyerahkan BLT ke rumah warga	Ya	4	3,33	1	3,33
	Tidak	116	96,67	29	96,67

Sumber : data survei

Dari hasil survei terlihat bahwa sebagian besar identitas RTS BLT sama dengan data yang ada, sehingga kondisi ini tidak menimbulkan masalah mendasar dalam pencairan BLT. Berdasarkan wawancara mendalam terlihat bahwa sangat sedikit terjadi ketidakcocokan nama (hanya sekitar 2- 10 persen). Dari ketidakcocokan yang sedikit tadi, verifikasi dilakukan dengan kesepakatan di tingkat RT, sehingga BLT untuk warga yang ternyata meninggal bisa langsung dialihkan ke warga lain yang kurang mampu. Ketidakcocokan lain selain karena warga telah meninggal terlihat di salah satu kelurahan yang sebagian besar warganya (90 persen) bekerja di pabrik. Ketika pabrik tutup maka terjadi pengangguran dan menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Perubahan data juga disebabkan karena dampak PHK, pekerja musiman menciptakan buruh yang betul-betul miskin, dan bergesernya penerima yang pada tahun 2005 masuk kategori miskin, namun pada 2008 telah keluar dari garis kemiskinan.

Di Kota Semarang, kurang lebih 90 persen responden RTS BLT dan 80 persen responden aparat menyatakan bahwa tidak terdapat kasus penundaan pendistribusian kartu BLT, dan jadwal pencairan BLT pun disosialisasikan secara baik. Sekitar 66,67 persen RTS BLT menyatakan bahwa loket pencairan BLT sudah memadai, namun 96,67 persen

responden RTS BLT menyatakan bahwa upaya aparat untuk melakukan 'jemput bola' masih sangat kurang. Hal ini mengakibatkan beberapa kasus warga yang sakit atau cacat mengalami kesulitan ketika harus mencairkan BLT. Kondisi ini bertentangan dengan himbauan Wakil Wali Kota Mahfudz Ali (www.suaramerdeka.com) yang mengatakan, PT Pos Indonesia yang menjadi *leading sector* penyaluran BLT seharusnya melakukan jemput bola. Para petugas sebaiknya menyerahkan BLT ke rumah warga, yang kesulitan untuk datang sendiri ke kantor pos, baik karena sakit berat atau tua renta. Namun ternyata himbaun ini tidak mudah dilaksanakan karena keterbatasan petugas.

Tabel 3.9. Informasi Keluarga Miskin di 10 Kecamatan

Kecamatan	Tahun 2005			Tahun 2008		
	Kel. Miskin di RT	Penerima di RT	Ketidakcocokan	Kel. Miskin Di RT	Penerima di RT	Ketidakcocokan
Pedurungan	40	35	0	50	34	1
Genuk	65	41	2	68	40	2
Banyumanik	40	35	0	57	30	0
Gunungpati	52	61	0	50	55	0
Ngaliyan	58	25	10	55	17	0
Semarang Barat	48	36	0	48	34	0
Tembalang	55	21	0	55	19	0
Gayamsari	81	42	0	81	41	0
Semarang Timur	31	15	0	33	15	0
Semarang utara	30	14	0	39	22	0

Sumber : data survei

Dalam wawancara mendalam, ketidakcocokan nama antara RTS BLT dan KTP biasanya diatasi dengan menggunakan DPP5. Apabila dalam kartu BLT terjadi salah ketik nama, maka konfirmasi dilakukan melalui KTP dan DPP5, kemudian ditandatangani lurah dan dibawa ke kantor pos.

3.4.3. Hal yang Menghambat di Lapangan

Menurut aparat sebagian besar kartu BLT tidak dibatalkan, hanya 8 ketua RT yang menyatakan ada kurang dari 25 persen yang dibatalkan, dan

1 ketua RT menyatakan di wilayahnya terdapat 26 - 50 persen kartu BLT yang dibatalkan, sedangkan yang lainnya menyatakan tidak ada pembatalan.

Tabel 3.10. Pembatalan Kartu BLT

Kriteria	Jawaban	Frek	%
Pembatalan Kartu BLT	0 %	21	70,00
	<25%	8	26,67
	26%-50%	1	3,33

Sumber : data survei

Meskipun dalam wawancara mendalam terlihat bahwa tidak terdapat masalah yang berarti dalam pencairan dana BLT karena adanya penjadwalan yang baik, namun sebagian besar responden (71,67 persen responden RTS BLT dan 40 persen responden aparat) memandang bahwa antrean yang terlalu panjang selama pencairan dana merupakan faktor utama yang dipandang menghambat penyaluran BLT. Antrean yang terlalu panjang ini menyebabkan beberapa orang yang mengantre sempat pingsan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perlu dipikirkan masalah fasilitas pendukung selain penyediaan loket, seperti misalnya tempat duduk atau sistem antrean yang lebih teratur.

Tabel 3.11. Faktor yang Menghambat Penyaluran BLT

Kriteria	Jawaban	Penerima		Aparat	
		Frek	%	Frek	%
Faktor yang menghambat penyaluran BLT	Jumlah petugas di setiap kantor pos terlalu sedikit	30,00	25,00	3	20,00
	Antrean yang terlalu panjang selama pencairan dana	86,00	71,67	6	40,00
	Rumah tinggal RTS BLT yang jauh	-	0,00	3	20,00
	Tidak adanya pelayanan keliling atau penyediaan pos pelayanan tambahan	4,00	3,33	0	0,00
	Lain-lain	-	0,00	3	20,00

Sumber : data survei

Faktor lain yang dipandang menghambat penyaluran BLT adalah jumlah petugas di setiap kantor pos yang terlalu sedikit, tidak adanya

pelayanan keliling (berdasarkan persepsi responden RTS BLT) dan rumah tinggal yang jauh (berdasarkan persepsi aparat). Dalam wawancara mendalam dengan Bapak Ngargono LP2K diperoleh informasi bahwa untuk daerah-daerah tertentu penerima BLT memerlukan biaya yang tinggi akibat jarak rumah ke kantor pos. Tampaknya perlu dipikirkan bahwa penerimaan sebaiknya dilakukan di setiap kelurahan atau dapat dilakukan pengambilan secara kolektif.

3.4.4. Syarat Pencairan dan Pungutan Lain

Prosedur pencairan BLT adalah dengan menggunakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) yaitu kartu identitas penerima kompensasi subsidi BBM yang berisikan data penerima untuk keperluan penarikan. Pencairan BLT oleh RTS berdasarkan KKB dilakukan di kantor pos. Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM dll).

Prosedur pencairan BLT yang terjadi di lapangan sama seperti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika seseorang akan mencairkan BLT maka mereka harus memiliki bukti diri atau KTP (83,33 persen responden RTS BLT), dan bila tidak memiliki KTP mereka akan dibantu untuk pembuatan KTP tanpa dipungut biaya di luar biaya resmi. Sumbangan sukarela juga tidak ada selama proses pencairan BLT. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur pencairan telah dilakukan dengan baik.

Tabel 3.12. Syarat Pencairan dan Pungutan Lain

Kriteria	Jawaban	Frek	%
Syarat adanya bukti diri (KTP) yang harus dimiliki oleh penerima?	Ya	100	83,33
	Tidak	20	16,67
Pemungutan biaya lain, bila tidak memiliki bukti diri (KTP)	Ya	1	0,83
	Tidak	119	99,17
Sumbangan sukarela ketika mencairkan BLT	Ya	8	6,67
	Tidak	112	93,33

Sumber : Data survei

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam wawancara mendalam dengan Bapak Haris dari bagian Bantuan Sosial Sekretaris Daerah Kota Semarang diketahui bahwa dari 82.665 RTS, yang memiliki KTP kota Semarang sebanyak 65.420 RTS. Berarti sisanya tidak memiliki KTP kota Semarang. Hal ini dapat menjadi celah penerimaan BLT ganda, apabila orang tersebut menggunakan KTPnya untuk meminta BLT di kota asal.

Beberapa pemberitaan juga menyebutkan di beberapa daerah terdapat potongan (atas inisiatif aparat setempat) untuk didistribusikan pada masyarakat miskin lain yang tidak mendapat BLT. Di kota Semarang, kasus ini tidak terjadi.

Tabel 3.13. Potongan Lain dalam Pencairan BLT

Kriteria	Jawaban	Penerima		Aparat	
		Frek	%	Frek	%
Potongan lain dengan alasan untuk didistribusikan ke masyarakat miskin	Ya	0	0,00	2	6,67
	Tidak	117	100,00	28	93,33

Sumber : Data survei

3.5. TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN

Ketidakpuasan terhadap pendistribusian BLT tetap muncul dalam masyarakat baik dari sisi penerima BLT (52,38 persen responden) maupun dari sisi aparat (86,67 persen). Ketika masih dalam proses penetapan sasaran, maka ketidakpuasan lebih banyak muncul dari sisi aparat (72,67 persen dan 80 persen), karena biasanya mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penetapan dan ketepatan sasaran. Dari sisi responden RTS BLT 62,19 persen menyatakan puas atas penetapan sasaran, hal ini disebabkan karena bagaimana pun mereka adalah penerima BLT.

Tabel 3.14. Tingkat Kepuasan Pelayanan

Kriteria	Jawaban	Penerima		Aparat	
		Frek	%	Frek	%
Adanya ketidakpuasan masyarakat sekitar anda dalam pendistribusian BLT	Ya	44	52,38	26	86,67
	Tidak	40	47,62	4	13,33
Kepuasan terhadap penetapan sasaran yang dilakukan pemerintah	Sangat Tidak Puas	2	1,68	2	6,67
	Tidak Puas	39	32,77	23	76,67
	Puas	74	62,18	5	16,67
	Sangat Puas	4	3,36	0	0,00
Kepuasan terhadap ketepatan sasaran yang dilakukan pemerintah	Sangat Tidak Puas	0	0,00	3	10,00
	Tidak Puas	35	29,17	24	80,00
	Puas	84	70,00	3	10,00
	Sangat Puas	1	0,83	0	0,00
Kepuasan terhadap sosialisasi yang dilakukan pemerintah (berkaitan dengan waktu dan tempat)?	Sangat Tidak Puas	4	3,33	0	0,00
	Tidak Puas	30	25,00	20	66,67
	Puas	86	71,67	10	33,33
	Sangat Puas	0	0,00	0	0,00
Kepuasan terhadap pembagian kartu yang dilakukan pemerintah	Sangat Tidak Puas	1	0,83	1	3,33
	Tidak Puas	15	12,50	13	43,33
	Puas	104	86,67	16	53,33
	Sangat Puas	0	0,00	0	0,00
Kepuasan terhadap pencairan dana yang dilakukan pemerintah	Sangat Tidak Puas	1	0,83	0	0,00
	Tidak Puas	42	35,00	20	68,97
	Puas	77	64,17	9	31,03
	Sangat Puas	0	0,00	0	0,00
Kepuasan terhadap penanganan masalah yang dilakukan pemerintah	Sangat Tidak Puas	1	0,85	1	3,45
	Tidak Puas	39	33,05	24	82,76
	Puas	74	62,71	4	13,79
	Sangat Puas	4	3,39	0	0,00

Sumber : Data survei

Dalam proses sosialisasi jadwal pencairan, pembagian kartu, pencairan dana maupun pengaduan apabila terjadi masalah, rasa tidak puas lebih sering muncul pada aparat dibandingkan dengan penerima BLT. Penggalian lebih dalam melalui wawancara mendalam menunjukkan bahwa ketua RT dan lurah menjadi merasa tidak puas karena beban pekerjaannya bertambah, dan harus menangani keluhan warga, yang biasanya tidak

dapat diselesaikan secara tuntas, karena keterbatasan dana BLT. Dalam wawancara mendalam ini pula terlihat bahwa ketidakpuasan akan berkurang, apabila mereka dilibatkan lebih banyak pada pendataan warga miskin. Dan bila dalam tahun 2008 ini, memang hanya dilakukan proses verifikasi, maka menurut responden aparat, proses ini tidak terlalu memadai, mengingat pergeseran dari miskin menjadi tidak miskin dan sebaliknya sangat mungkin terjadi.

Ketidaktepatan sasaran juga tergali pada pertanyaan apakah terdapat masyarakat miskin di sekeliling anda yang seharusnya menerima BLT, tetapi justru tidak menerima. Dari pertanyaan ini 39,20 persen responden RTS BLT dan 86,67 persen responden aparat menyatakan ya. Dalam pertanyaan adakah masyarakat yang mampu namun justru menerima BLT, sebagian besar responden menyatakan tidak. Data ini menunjukkan indikasi bahwa memang terjadi perubahan data dari 2005 ke 2008, dimana masyarakat miskin menjadi lebih banyak. Ketidaktepatan sasaran lebih dikarenakan bertambahnya warga miskin dan bukan karena beberapa warga miskin telah menjadi lebih sejahtera.

Tabel 3.15. Ketidaktepatan Sasaran

Kriteria	Jawaban	Penerima		Aparat	
		Frek	%	Frek	%
Terdapat masyarakat di sekeliling anda yang tidak seharusnya menerima BLT?	Ya	37	30,83	10	38,46
	Tidak	83	69,17	16	61,54
Terdapat masyarakat miskin di sekeliling anda yang seharusnya menerima BLT, tetapi justru tidak menerima	Ya	78	39,20	26	86,67
	Tidak	42	21,11	4	13,33

Sumber : Data survei

Menurut pengamatan responden, ketidaktepatan sasaran di lingkungan mereka sangat kecil yaitu kurang dari 5 orang. Hasil ini didukung oleh data yang diperoleh dalam wawancara mendalam dimana responden Lurah menyatakan ketidaktepatan sekitar 2 persen - 10 persen. Untuk warga yang mampu namun mendapat BLT terlihat bahwa ternyata mereka memiliki pekerjaan tetap, rumah telah menjadi lebih bagus dan

memiliki kendaraan bermotor. Pada kasus semacam ini, menurut responden Lurah penyelesaiannya lebih sulit, karena warga yang sudah mampu namun tetap menerima BLT biasanya enggan untuk mengembalikan, memindahkan atau menyisihkan dananya untuk warga yang tidak mampu. Dan kelurahan tidak dapat memaksa, karena adanya kartu BLT menunjukkan adanya hak untuk menerima BLT. Sedangkan untuk warga miskin yang ternyata tidak mendapat BLT, biasanya akan dimusyawarahkan, dan apabila terdapat kartu yang tidak digunakan karena pemilikinya pindah atau meninggal, maka melalui musyawarah dapat diputuskan untuk dialihkan.

3.6. SISTEM PENGADUAN

Pada dasarnya bentuk ketidakpuasan masyarakat hanya disampaikan dalam bentuk keluhan (97,80 persen responden RTS BLT dan 96,15 persen responden aparat). Apabila terjadi ketidakpuasan, sebenarnya hal terbaik yang bisa dilayani oleh pemerintah adalah penyediaan posko pengaduan. Menurut responden, pemerintah tidak menginformasikan secara luas cara pengaduan (82,50 persen responden RTS BLT dan 86,21 persen responden aparat), belum menyediakan posko pengaduan apabila terjadi kesalahan dalam pendistribusian BLT.

Tabel 3.16. Sistem Pengaduan

Kriteria	Jawaban	Penerima		Aparat	
		Frek	%	Frek	%
Bentuk ketidakpuasan masyarakat yang muncul	Keluhan	89	97,80	25	96,15
	Protes Keras	0	0,00	0	0,00
	Demonstrasi	2	2,20	1	3,85
	Ancaman	0	0,00	0	0,00
	Pengrusakan	0	0,00	0	0,00
	Lain-lain	0	0,00	0	0,00
Adanya posko pengaduan apabila terjadi kesalahan dalam pendistribusian BLT	Ya	25	20,83	6	20,69
	Tidak	95	79,17	23	79,31
Cara pengaduan diinformasikan secara luas	Ya	21	17,50	4	13,79
	Tidak	99	82,50	25	86,21

Sumber : Data survei

Akibat dari tidak adanya sosialisasi cara pengaduan dan tidak adanya posko pengaduan yang didirikan secara resmi oleh pemerintah, seluruh ketidakpuasan itu harus ditampung oleh ketua RT , atau naik ke tingkat atasnya yaitu ke Lurah. Dalam wawancara mendalam, selama ini tidak ada mekanisme pengaduan yang jelas. Biasanya warga akan mengadu ke RT, RW atau Kasi Kesejahteraan Sosial dan Lurah. Selama ini keluhan warga masih dapat diatasi, karena di tingkat RT biasanya akan dilakukan musyawarah, terutama untuk mengatasi ketidakadilan, karena pemberian BLT tidak merata.

Tabel 3.17. Cara Penanganan Pengaduan

Kriteria	Jawaban	Frek	%
Cara aparat meredam	Dibuka kembali pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak	10	62,50
	Ada kesediaan penerima BLT untuk membagi sebagian dana kepada rumah tangga miskin lainnya	2	12,50
	Ada pejabat yang menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima BLT pada tahap berikutnya	4	25,00
	lain-lain	0	0,00

Sumber : Data survei

Biasanya tindakan yang dilakukan oleh ketua RT dalam menghadapi keluhan warga adalah membuka kembali pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak (62,50 persen), atau menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima BLT pada tahap berikutnya (25 persen), sedangkan kesediaan berbagi dari penerima BLT lain hanya mencapai 12,50 persen. Persentase pada alternatif terakhir ini sangat masuk akal, karena bagaimana pun mereka termasuk masyarakat miskin, yang tidak mungkin dituntut untuk berbagi.

3.7. DAMPAK EKONOMIS BLT

Pemberian BLT pertama kali akan menyentuh aspek perasaan terlebih dulu baru kemudian berubah ke tataran yang lebih riil yaitu daya beli. Sebagian besar responden (96,67 persen)³ menyatakan mereka senang dengan adanya BLT ini, dan 75,83 persen menyatakan bahwa program BLT ini berguna (70 persen responden aparat juga menyatakan hal yang sama). Sebanyak 61,34 persen responden memandang bahwa BLT ini mampu mengurangi beban pengeluaran, namun 87,50 persen menyatakan bahwa mereka tidak mengalami peningkatan daya beli setelah menerima BLT.

Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa program BLT memberikan rasa positif bagi masyarakat yang menerima, namun bila dilihat lebih lanjut terhadap pengurangan beban pengeluaran dan daya beli, terlihat adanya hasil yang kontradiktif.

Tabel 3.18. Persepsi atas Dampak BLT

Kriteria	Jawaban	Frek	%
Rasa senang dengan adanya BLT	Ya	116	96,67
	Tidak	4	3,33
Kegunaan program BLT	Tidak berguna	6	5,00
	Berguna	91	75,83
	Tidak tahu	23	19,17
Adanya peningkatan daya beli setelah menerima BLT	Ya	15	12,50
	Tidak	105	87,50
Pengurangan beban pengeluaran anda dan keluarga dengan adanya BLT	Ya	73	61,34
	Tidak	46	38,66

Sumber : Data survei

BLT tetap dipandang oleh sebagian besar responden mampu mengurangi beban pengeluaran, namun belum mampu meningkatkan daya beli. Pemeriksaan silang terhadap hasil ini adalah dengan melihat jangka waktu pemanfaat BLT. Dari hasil survei diperoleh kenyataan bahwa 53,50

³ Responden yang menyatakan tidak memiliki perasaan senang terhadap BLT adalah responden yang memiliki penghasilan di atas kriteria. Hal ini mengakibatkan penerimaan BLT tidak memberikan dampak rasa senang karena pada dasarnya mereka tidak membutuhkan.

persen responden menyatakan uang BLT yang diterima langsung habis dikonsumsi saat itu juga, 32,50 persen menyatakan uang BLT habis dalam waktu 1 bulan, serta 12,50 persen dan 2,50 persen menyatakan habis dalam 1 minggu dan 2 minggu. Hal ini masih jauh dari panjang dampak terjadinya inflasi yang dirasakan masyarakat.

Tabel 3.19. Jangka Waktu Pemanfaatan BLT

Kriteria	Jawaban	Frek	%
Jangka waktu pemanfaatan BLT	Langsung habis	63	52,50
	1 minggu	15	12,50
	2 minggu	3	2,50
	1 bulan	39	32,50

Sumber : Data survei

Seperti dikemukakan di awal dana BLT pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM, mau tidak mau akan memicu terjadinya inflasi di kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian BPS Jawa Tengah, inflasi di Jawa Tengah memiliki panjang respon selama 2 bulan. Harapan dari pemberian BLT tentunya akan mengurangi pemburukan daya beli tersebut, setidaknya mendekati dampak inflasi yang akan dirasakan oleh masyarakat miskin.

Implikasi dari kondisi ini menunjukkan bahwa nilai BLT yang diberikan kurang mencukupi. Kategori kurang mencukupi dalam hal ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu BLT habis dalam waktu singkat, atau seharusnya BLT diberikan dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga dampak inflasi akan lebih teredam akibat adanya dana yang bisa meningkatkan daya beli secara berkesinambungan. Hasil ini memperkuat indikasi bahwa BLT belumlah mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Program perlindungan sosial (*social protection*) yang diberikan pemerintah, sebenarnya memiliki banyak bentuk. Subsidi yang diberikan pemerintah pada masyarakat dapat berbentuk pemberian diskon harga, pemberian kupon, tabungan, atau BLT. BLT sendiri dapat dibedakan menjadi BLT dengan syarat (*conditional cash transfer*) dan BLT tanpa

syarat (*Unconditional cash tranfer*). Contoh dari *conditional cash tranfer* di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu BLT dengan sasaran untuk akses pendidikan dan kesehatan dan atau pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 3.20. Alternatif Bentuk Subsidi

Kriteria	Jawaban	Frek	%
Alternatif bantuan yang dikehendaki	Tetap BLT	51	42,50
	Subsidi barang dalam bentuk sembako murah	47	39,17
	Pengobatgratis per bulan	4	3,33
	Uang sekolah gratis per bulan	13	10,83
	lain-lain: tanpa BLT dan BBM tidak dinaikkan	5	4,17

Sumber : Data survei

Meskipun BLT dipandang belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat, namun 42,50 persen responden RTS BLT tetap menghendaki BLT diberikan dan tidak diganti dengan wujud lain, sedangkan 39,17 persen lebih memilih adanya subsidi dalam bentuk barang seperti misalnya sembako murah, dan 10,83 persen lebih memilih uang sekolah gratis per bulan.

Upaya meredam dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat miskin dengan meningkatkan nilai BLT atau memperpanjang masa pemberian BLT, belum pasti merupakan langkah yang tepat. Masyarakat dan aparat pemerintah sebenarnya melihat bahwa BLT perbulan yang layak adalah sekitar Rp 300.000,00 (di atas 50 persen responden menyatakan hal ini).

Tabel 3.21. Jumlah BLT yang Diinginkan

Kriteria	Jawaban	Penerima		Aparat	
		Frek	%	Frek	%
Jumlah BLT per bulan yang layak menurut anda	Rp300,000	67	55,83	13	59,09
	Rp 301.000 - Rp 500.000	34	0,00	8	36,36
	> Rp 500.000	19	15,83	1	4,55

Sumber : Data survei

Namun apabila kondisi ini dirasionalisasi silang dengan pendapat Lurah dan pakar, maka tampaknya sebagian besar dari mereka memandang BLT yang diberikan terus-menerus justru tidak akan mendidik masyarakat. BLT memang sebaiknya hanya diberikan sebagai langkah awal memperbaiki daya beli, namun tidak untuk “memanjakan” masyarakat dalam jangka waktu lama. Dalam wawancara mendalam dengan lurah dan pakar terlihat mereka lebih setuju bila langkah ke depan adalah pemerintah memilikirkan mengenai proyek padat karya, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih berkesinambungan.

Pro dan kontra mengenai pemberian BLT sampai saat ini masih terus berlangsung. Sebagian orang berpendapat bahwa BLT tidak mendidik karena masyarakat miskin menjadi tergantung dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Ada yang berpendapat bahwa BLT kepada RTS bersifat *charity* dan menimbulkan budaya malas, ketergantungan dan memintaminta belas kasihan pemerintah serta secara ekonomi mikro menumbuhkan budaya konsumtif sesaat, karena penggunaan uang tidak diarahkan oleh pemerintah (*unconditional cash transfer*). Pendapat ini tidak sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Hasil survei berikut ini menunjukkan fakta yang terjadi di masyarakat.

Tabel 3.22. Persepsi atas Ketidakmanfaatan BLT

Kriteria	Jawaban	Penerima		Aparat	
		Frek	%	Frek	%
Program ini kontraproduktif terhadap program pemberdayaan masyarakat	Ya			11	36,67
	Tidak			5	16,67
	Ragu-Ragu			14	46,67
BLT hanya semacam “memberikan ikan dan bukan kail” kepada masyarakat	ya	52	43,33	20	66,67
	Ragu-ragu	52	43,33	5	16,67
	Tidak	16	13,33	5	16,67
BLT membuat penerima menjadi tidak produktif dan menggantungkan diri pada BLT	Ya	9	7,50	5	16,67
	Ragu-ragu	11	9,17	7	23,33
	Tidak	100	83,33	18	60,00

Sumber : Data survei

Sekitar 46,67 persen responden aparat menyatakan keragu-raguannya terhadap sisi kontraproduktif dari program BLT, namun 36,67 persen menyatakan bahwa program BLT bersifat kontraproduktif. Sebanyak 20 persen responden aparat dan 43,33 persen responden RTS BLT menyatakan bahwa BLT hanya semacam memberikan ikan dan bukan kail kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat penerima BLT pun berharap bahwa bantuan yang diterima bukan hanya sekedar bantuan untuk meningkatkan daya beli yang tidak memiliki kesinambungan, namun lebih berharap adanya inovasi pemerintah dalam pemberian subsidi tersebut.

Keinginan untuk berkembang dan menjadi produktif juga terjawab dari pernyataan efek BLT terhadap produktivitas. 83,33 persen responden RTS BLT dan 60 persen responden aparat menyatakan bahwa BLT tidak menjadi malas dan hanya menggantungkan diri pada BLT. Fenomena ini mengindikasikan bahwa RTS BLT saat ini memang membutuhkan BLT untuk mengurangi beban pengeluaran, dan mereka tidak akan menjadi malas ataupun tidak produktif dengan adanya subsidi ini karena dampak dari subsidi ini hanya sesaat. Di sisi lain mereka juga menyadari bahwa lebih baik bila subsidi yang diberikan adalah yang berkesinambungan dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pendapat tersebut patut menjadi perhatian semua pihak, karena menghadapi masyarakat miskin selayaknya tidak dengan program yang sifatnya *hit and run*, namun perlu program yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan mendorong mereka untuk mendayagunakan potensi dan sumber yang dimiliki (*empowering*). Sehingga BLT yang lebih bersifat sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM, perlu didukung oleh skema lain yang bersifat *empowering*

3.8. PENGGUNAAN BLT

Dana BLT merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan utama menaikkan daya beli masyarakat yang turun akibat naiknya harga BBM. Berdasarkan kondisi ini, secara ideal, penggunaan utama dari BLT adalah digunakan untuk konsumsi. Prioritas tertinggi dari penggunaan BLT adalah untuk konsumsi (77,5 persen), membayar keperluan anak sekolah (16,67 persen), disimpan (2,5 persen) dan membayar utang (1,67 persen), sedangkan penggunaan untuk biaya berobat sebesar 0,83 persen dan modal usaha sebesar 0,83 persen.

Tabel 3.23. Penggunaan dana BLT

Kriteria	Jawaban	Frek	%
Penggunaan dana BLT	Konsumsi	93	77,5
	Keperluan sekolah anak	20	16,67
	Perbaikan rumah	-	-
	Modal usaha	1	0,83
	Membayar utang	2	1,67
	Biaya berobat	1	0,83
	Disimpan	3	2,5
	Lain -lain:	-	-

Sumber : Data survei

Responden yang menggunakan BLT untuk konsumsi, memprioritaskan pembelian beras dan sembako (92,59 persen), kemudian diikuti dengan pembelian sandang dan bahan bakar. Sebagian besar responden yang dapat menyimpan uang BLT memilih untuk menyimpan di rumah karena bukan untuk tabungan dengan jangka panjang, namun hanya menunda pembelian saja.

Penggunaan BLT untuk hal lain di luar konsumsi menunjukkan bahwa penerima BLT memiliki berbagai macam pengeluaran yang harus juga dicukupi di luar konsumsi. Sehingga sebagian kecil dari dana BLT digunakan

untuk memenuhi pembayaran utang, kebutuhan anak sekolah, membayar biaya pengobatan, perbaikan rumah dan modal usaha.

Tabel 3.24. Prioritas Konsumsi

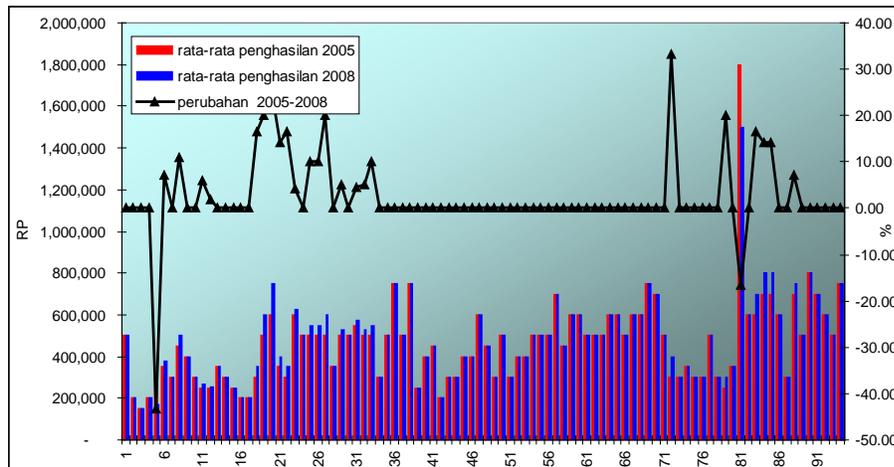
Kriteria	Jawaban	Frek	%
Prioritas Konsumsi	Beras (9 bahan pokok)	100	92,59
	Sandang	2	1,85
	Bahan Bakar	1	0,93
	Lain-lain	5	4,63

Sumber : Data survei

Dari hasil kuesioner diketahui bahwa pola penggunaan dana BLT tidak hanya digunakan pada satu hal saja, misalnya konsumsi. Penerima BLT menggunakan dana BLT untuk beberapa kepentingan sekaligus, meskipun prioritas utamanya tetap konsumsi. Penggunaan BLT untuk membiayai anak sekolah mengindikasikan bahwa dana BOS yang diberikan lewat sekolah untuk mendukung program wajib belajar belum mencukupi, sehingga sebagian dana BLT masih harus disisihkan untuk pembiayaan sekolah. Penggunaan BLT untuk modal usaha mengindikasikan ada sebagian dari penerima BLT yang telah memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Rasionalisasi dari indikasi ini adalah karena modal usaha bukanlah kebutuhan primer, sehingga ketika seseorang menggunakan dana BLT untuk mencukupi kebutuhan yang non primer, maka sebetulnya mereka telah berada dalam kondisi kesejahteraan yang relatif lebih baik.

3.9. INDIKASI EFEKTIVITAS DAMPAK BLT

Kantor Menko Kesra mendefinisikan tingkat efektivitas penyaluran BLT adalah seberapa jauh BLT dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin penerima bantuan. Survei ini mencoba mendekati ukuran efektivitas dengan menggunakan data penghasilan, pengeluaran, dan nilai konsumsi yang dilakukan oleh responden



Sumber : data survei

Gambar 3.2. Rata-Rata Penghasilan Responden per Bulan

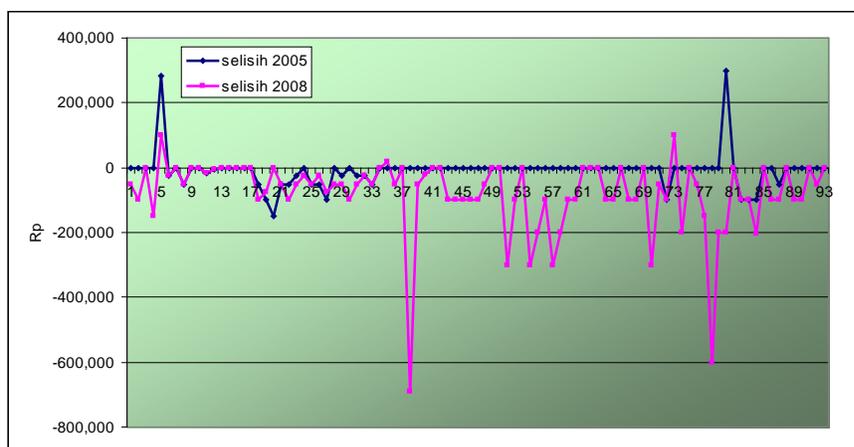
Data penghasilan responden menunjukkan bahwa rata-rata perubahan penghasilan nominal mereka dalam 2 tahun terakhir ini adalah sebesar 2,08 persen. Padahal inflasi Jawa Tengah pada kuartal 1 2008 sebesar 7,95 persen (yoy), sedangkan kuartal 4 2007 adalah 6,24 persen (BPS, Jawa Tengah 2008). Inflasi yang terbesar di kuartal 1 2008 terjadi di inflasi bahan makanan sebesar 13,36 persen, dan diikuti oleh makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (10,69 persen) dan sandang (9,69 persen). Dengan kenaikan pendapatan nominal rata-rata sebesar 2,08, maka sebenarnya secara riil masyarakat telah mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Memang terdapat beberapa responden yang mendapat kenaikan penghasilan (karena penyesuaian inflasi), namun sebagian besar penghasilannya tidak mengalami perubahan. Dalam beberapa kasus ekstrim perubahan penghasilan responden ada yang mengalami penurunan dratis (sampai -40 persen) dan disebabkan karena responden dulunya bekerja kemudian menjadi di PHK, dan melakukan kerja serabutan.

Tabel 3.25. Pengeluaran Responden per Bulan (dalam Rp)

Ukuran	2005	2008	%
Rata-rata	440.769	505.598	14,71
Nilai paling sering muncul	300.000	600.000	
Minimum	100.000	150.000	
Maksimum	1.200.000	1.500.000	
Jumlah responden	118	118	

Sumber : data survei

Data berikutnya yang dapat dilihat adalah data pengeluaran per bulan dari responden. Tahun 2005 rata-rata pengeluaran per bulan adalah Rp 440.729 dan mengalami kenaikan sebesar 14,71 persen di tahun 2008 menjadi Rp 505.598,00. Bila dilihat dari komponen inflasi, maka kemungkinan terbesar kenaikan pengeluaran RTS BLT berasal dari pengeluaran untuk kebutuhan primer yaitu makan dan sandang.



Sumber : data survei

Gambar 3.3. Selisih Penghasilan dan Pengeluaran Responden per Bulan

Gambar 3.3. menunjukkan selisih antara penghasilan dan pengeluaran responden per bulan pada tahun 2005 dan 2008. Kondisi defisit anggaran rumah tangga pada tahun 2005 masih relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2008. Adanya subsidi sebesar Rp 100.000,00 per bulan, atau yang diberikan pada tahun awal sebesar Rp 300.000,00 tampaknya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap defisit anggaran yang dirasakan oleh RTS. Kondisi ini diperarah

dengan kenyataan bahwa dana BLT hanya dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Pembelian sembako yang dilakukan oleh responden perbulan pada tahun 2005 rata-rata sebesar Rp 288.162,00 dan meningkat sebesar 14,56 persen pada tahun 2008 menjadi Rp 330.120,00. Pada tahun 2008, sebagian besar responden menyatakan pengeluaran untuk membeli sembako sebesar Rp 300.000. Dari hasil survei terlihat bahwa prioritas utama penggunaan dana BLT adalah untuk membeli sembako. Pengeluaran tambahan untuk membeli sembako rata-rata adalah Rp 50.000,00, sehingga bila diasumsikan BLT hanya untuk membeli sembako saja, maka jumlah ini mencukupi. Masalahnya kebutuhan lain pun harus dipenuhi dari dan BLT tersebut. Sehingga persepsi responden, dana BLT yang ada sekarang tetap belum mencukupi.

Tabel 3.26. Pembelian Sembako per Responden (dalam Rp)

Ukuran	2005	2008	%
Rata-rata	288.162	330.120	14,56
Nilai paling sering muncul	200.000	300.000	
Mininum	40.000	47.000	
Maksimum	1.000.000	1.300.000	
Jumlah responden	117	117	

Sumber: Data survei

Bila BLT digunakan untuk membeli bensin, mengingat sebagian responden memiliki kendaraan bermotor, dan pengeluaran untuk transportasi umumnya justru sedikit, maka dibandingkan tahun 2005, tahun 2008 ini mengalami kenaikan sebesar 29,13 persen. Tentu saja, kebutuhan untuk membeli bensin tidak dapat tercakup oleh dana BLT.

Tabel 3.27. Pembelian Bensin per Responden (dalam Rp)

Ukuran	2005	2008	%
Rata-rata	79.375	102.500	29,13
Nilai paling sering muncul	100.000	60.000	
Mininum	25.000	30.000	
Maksimum	200.000	250.000	
Jumlah responden	8	8	

Sumber: Data survei

Bila pembelian bensin hanya dilakukan oleh 8 responden, maka pertanyaan mengenai penggunaan transportasi umum dijawab oleh 74 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari. Pengeluaran untuk transportasi umum per RTS cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2005. Rata-rata pengeluaran untuk transportasi umum pada 2005 sebesar Rp 80.270,00 dan meningkat sebesar 27,78 persen pada 2008 menjadi Rp 102.568,00. Sebagian besar responden RTS BLT mengeluarkan dana untuk transportasi umum mencapai Rp 150.000,00, dan jumlah terbesar yang dikeluarkan oleh salah satu responden menjadi Rp 600.000,00 per bulan. Kenaikan harga BBM rupanya mendorong RTS BLT untuk beralih ke transportasi umum, meskipun tetap saja harus mengeluarkan nilai rupiah yang lebih banyak dibanding sebelum kenaikan BBM.

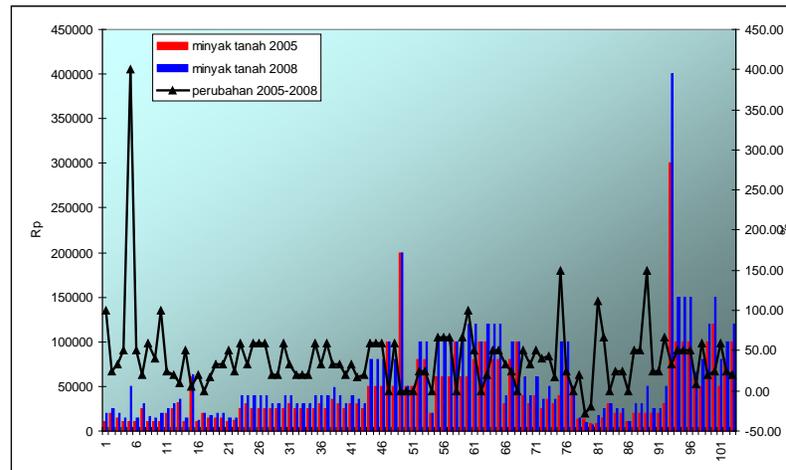
Tabel 3.28. Pengeluaran Transportasi Umum per Responden (dalam Rp)

Ukuran	2005	2008	%
Rata-rata	80.270	102.568	27,78
Nilai paling sering muncul	100.000	150.000	
Mininum	20.000	20.000	
Maksimum	600.000	600.000	
Jumlah responden	74	74	

Sumber: Data survei

Salah satu kriteria kemiskinan adalah penggunaan minyak tanah yang relatif tinggi dibandingkan kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lebih mapan. Rata-rata pembelian minyak tanah pada tahun 2008

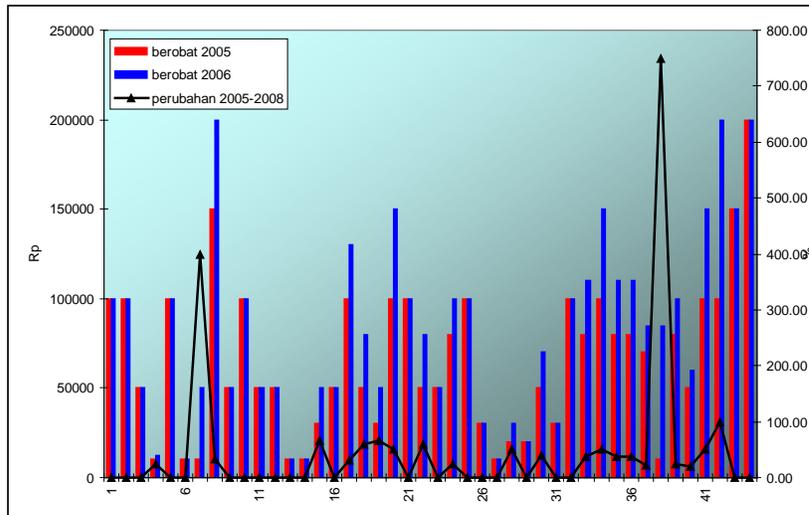
adalah sebesar Rp 59.539,00 atau naik 34,32 persen dibandingkan tahun 2005. Sebagian besar dari reponden RTS BLT, menyatakan harus mengeluarkan lebih banyak untuk pembelian minyak tanah. Dana BLT pun sebagian dialokasikan untuk menutup pertambahan ini.



Sumber: Data survei

Gambar 3.4. Pembelian Minyak Tanah per Responden

Pengeluaran lain di samping untuk kebutuhan sembako, transportasi dan minyak tanah, adalah untuk berobat. Meskipun dalam kriteria miskin dituliskan bahwa RTS BLT kemungkinan tidak dapat berobat ke dokter atau puskesmas namun pada kenyataannya mereka mengeluarkan biaya per bulan yang cukup besar untuk kepentingan berobat. Pengeluaran untuk berobat pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 25,26 persen menjadi Rp 82.557,00. Dan dari 44 responden yang menjawab pengeluaran pengobatan, tidak satu pun di antara mereka yang mengalami penurunan pengeluaran untuk berobat.



Sumber: Data survei
Gambar 3.5. Pengeluaran untuk Berobat per Responden

Dari beberapa tolok ukur di atas, maka dapat dilihat bahwa lonjakan pengeluaran untuk kebutuhan hidup relatif besar. Pencairan BLT sebesar Rp 100.000,00 per bulan, tampaknya tidak dapat hanya digunakan untuk menutup satu kebutuhan saja, sehingga jumlah ini tetap dinilai kurang.

Bila ukuran efektivitas yang digunakan adalah ukuran yang dikeluarkan oleh Menko Kesejahteraan Rakyat, dimana efektivitas diukur dari pengurangan beban hidup, maka BLT telah mampu mengurangi beban hidup RTS BLT. Namun bila tolok ukur ini dipertanyakan lebih dalam mengenai seberapa besar pengurangannya dan seberapa lama kesinambungannya, maka data-data di atas tampaknya belum menunjukkan efektivitas pemberian BLT berlangsung optimal.

BAB 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei maka dapat disimpulkan hal-hal berikut.

- a. Karakteristik responden RTS BLT adalah sebagian besar bekerja dalam kategori lain-lain karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, atau berwiraswasta seperti berdagang di pasar, kaki lima, dan lainnya adalah buruh harian dan pensiunan. RTS BLT sebagian besar memiliki tanggungan keluarga kurang dari 5 orang.
- b. Kesesuaian dengan kriteria kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan indikasi ada beberapa ketidaksesuaian. Kesesuaian tercermin dari penghasilan yang sebagian besar di bawah Rp 600.000,00, namun bila dilihat dari kondisi fisik, maka sebanyak 89,17 persen responden menyatakan mengkonsumsi daging atau telur atau ikan atau ayam kurang dari 2 kali dalam satu bulan dan 10,83 persen menyatakan mengkonsumsi 3 - 5 kali dalam satu bulan. Sebanyak 53,33 persen responden menyatakan memiliki jamban di dalam rumah (artinya memiliki jamban sendiri, dan bukan WC umum), 62,71 persen memiliki televisi, dan 89,17 persen menyatakan memiliki listrik. Ketidaktepatan kriteria RTS BLT antara yang distandarkan oleh BPS dengan kondisi di lapangan, mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah memang terjadi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran sesuai dengan kriteria kemiskinan BPS, dan atau yang kedua adalah kriteria miskin itu sendiri yang perlu dipertimbangkan ulang.
- c. Pada tahap verifikasi data aparat RT, RW, dan Lurah merasa kurang dilibatkan. Tingkat partisipasi aparat pemerintah masih relatif rendah baik dari proses awal sampai ke pencairan. Sebagian besar identitas RTS BLT sama dengan data yang ada, sehingga kondisi ini tidak

menimbulkan masalah mendasar dalam pencairan BLT. Pencairan BLT di Kota Semarang pun berjalan dengan lancar, keluhan muncul pada antrean yang terlalu panjang, jumlah petugas di setiap kantor pos yang terlalu sedikit, dan tidak adanya pelayanan keliling untuk warga yang memiliki hambatan khusus.

- d. Sebanyak 17.245 RTS di Kota Semarang tidak memiliki KTP Semarang. Tidak adanya KTP setempat dapat menimbulkan celah untuk penerimaan BLT ganda apabila yang bersangkutan meminta ulang ke kota asal.
- e. Masalah ketidaktepatan sasaran tidak terlalu tinggi di Kota Semarang dan lebih dikarenakan bertambahnya warga miskin dan bukan karena beberapa warga miskin telah menjadi lebih sejahtera. Apabila terjadi ketidaktepatan sasaran karena pemegang kartu meninggal, maka kartu diberikan kepada istrinya, namun apabila tidak terdapat lagi keluarga, maka akan dialihkan ke RTS lain dengan dimusyawarahkan terlebih dahulu di RT atau kelurahan.
- f. Ketidapuasan masyarakat hanya disampaikan dalam bentuk keluhan dan pengaduan kepada ketua RT, karena tidak ada sosialisasi yang jelas mengenai mekanisme dan posko pengaduan.
- g. Sebanyak 61,34 persen responden memandang bahwa BLT ini mampu mengurangi beban pengeluaran, namun 87,50 persen menyatakan bahwa mereka tidak mengalami peningkatan daya beli setelah menerima BLT. Sebanyak 53,50 persen responden menyatakan uang BLT yang diterima langsung habis dikonsumsi saat itu juga, sisanya pada kisaran 1 minggu sampai satu bulan. Meskipun BLT dipandang belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat, namun 42,50 persen responden RTS BLT tetap menghendaki BLT diberikan dan tidak diganti dengan wujud lain, sedangkan 39,17 persen lebih memilih adanya subsidi dalam bentuk barang seperti misalnya sembako murah, dan 10,83 persen lebih memilih uang sekolah gratis per bulan.

- h. Prioritas tertinggi dari penggunaan BLT adalah untuk konsumsi (77,5 persen), membayar keperluan anak sekolah (16,67 persen), disimpan (2,5 persen) dan membayar utang (1,67 persen), sedangkan penggunaan untuk biaya berobat sebesar 0,83 persen dan modal usaha sebesar 0,83 persen. Responden yang menggunakan BLT untuk konsumsi, memprioritaskan pembelian beras dan sembako (92,59 persen), kemudian diikuti dengan pembelian sandang dan bahan bakar.
- i. Bila ukuran efektivitas yang digunakan adalah ukuran yang dikeluarkan oleh Menko Kesejahteraan Rakyat, dimana efektivitas diukur dari pengurangan beban hidup, maka BLT telah mampu mengurangi beban hidup RTS BLT. Namun bila tolok ukur ini dipertanyakan lebih dalam mengenai seberapa besar pengurangannya dan seberapa lama kesinambungannya, maka data-data di atas tampaknya belum menunjukkan efektivitas pemberian BLT berlangsung optimal.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut.

- a. Pembenahan penyaluran BLT di masa yang akan datang dapat dimulai dari adanya kriteria kemiskinan yang lebih tepat. Ketika kriteria kemiskinan telah dapat menggambarkan kondisi kemiskinan yang sesungguhnya, karena beberapa indikator seperti kepemilikan listrik, TV, dan jamban keluarga, tampaknya sudah tidak dapat menjadi ukuran kesejahteraan suatu keluarga. Untuk itu pemerintah dalam hal ini BPS perlu memikirkan penentuan kriteria yang lebih sesuai untuk di lapangan, atau dapat dengan alternatif menggunakan 14 kriteria yang sama namun dilakukan pembobotan sehingga justifikasi petugas di lapangan akan lebih obyektif.

- b. Perlu dilakukan pelibatan RT/RW/Lurah baik dalam proses pendataan maupun verifikasi secara lebih banyak. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi bias sasaran, karena bagaimana pun ketua RT/RW/Lurah, merupakan orang yang relatif lebih tahu kondisi warganya. Untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi maka, perlu adanya insentif bagi aparat kelurahan/desa dalam bentuk biaya operasional.
- c. Untuk mengatasi celah kemungkinan penerimaan BLT secara ganda (akibat tidak terlalu diperlukannya KTP di lapangan), maka perlu dibuat sistem yang lebih tegas mengenai KTP. Salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan menggunakan PIN, *social security number* nasional.
- d. Pemerintah sebaiknya tidak lagi mendasarkan diri pada anggaran untuk pembagian BLT karena akan mengakibatkan perlakuan yang tidak sama (*inequality treatment*) terhadap masyarakat miskin. Pemberian dana BLT sebaiknya diperuntukkan untuk semua masyarakat miskin, dan tidak didasarkan pada kuota. Sehingga implikasinya adalah penentuan anggaran harus didasarkan pada data kemiskinan, dan bukan jumlah penerima menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
- e. Ketidakpuasan yang muncul dari RT/RW/Lurah sebenarnya lebih disebabkan karena bertambahnya beban tugas mereka baik secara fisik maupun psikis karena harus menampung berbagai keluhan yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Untuk itu prosedur pengaduan dan adanya posko pengaduan merupakan hal yang penting untuk dipikirkan karena adanya mekanisme pengaduan yang jelas akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan dapat mengurangi beban yang harus ditanggung oleh ketua RT/RW/Lurah. Posko pengaduan sebaiknya ada di tingkat kelurahan sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan.
- f. Tolok ukur efektivitas program BLT yang dikeluarkan oleh Menko Kesra tampaknya juga perlu diperluas dan dipertajam. Penggunaan tolok ukur

efektivitas yang berupa pengurangan beban pengeluaran masyarakat, kemungkinan besar tercapai karena subsidi akan langsung digunakan untuk mendukung pengeluaran yang ada. Hal yang lebih penting dalam persepsi masyarakat mengenai peningkatan daya beli adalah adanya kontinuitas kemampuan beli. Data di masyarakat menunjukkan BLT hanya memiliki dampak yang sangat pendek. Sehingga hal yang perlu dipikirkan adalah panjang dampak yang ditimbulkan dan disertai skema program lain yang tujuannya adalah mengembangkan kemampuan produktif (*empowering*) masyarakat. Program *empowering* dapat mengacu pada program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu PNPM dan KUR. Kedua program ini sebaiknya dilakukan secara sinergis dengan program BLT.

BIBLIOGRAFI

- _____ (2005), Sistem Informasi Geografis Kemiskinan Indonesia
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2006), *Konsep Hasil Pemeriksaan Atas Program Subsidi Tunai Langsung (SLT) pada BPS Provinsi Jawa Barat, PT. Pos Indonesia dan Instansi Terkait di Bandung.*
- Departemen Sosial RI (2008), *Petunjuk Teknis Penyaluran BLT Untuk Rumah Tangga Sasaran*
- Hastuti et.al, (2006), *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Tunai Langsung Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota*, Lembaga Penelitian Smeru, Januari

LAMPIRAN 1. PERUBAHAN DATA 2005, 2008

KELURAHAN TRIMULYO KEC. GENUK

No	Pertanyaan	2005	2008
1	Jumlah keluarga miskin	315	Blm ada data
2	Jumlah penerima	230	230
3	Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan	0	0
4	Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas	27	27

Sumber : Data wawancara mendalam

KELURAHAN KEBON AGUNG KEC. SEMARANG TIMUR

No	Pertanyaan	2005	2008
1	Jumlah keluarga miskin	150	354
2	Jumlah penerima	271	344
3	Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan	-	62 (meninggal dan pindah rumah) →ada penggantian
4	Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas		

Ada yang mampu 1 dan dicoret

Sumber : Data wawancara mendalam

KELURAHAN SUMURREJO KEC. GUNUNG PATI

No	Pertanyaan	2005	2008
1	Jumlah keluarga miskin	740	1158
2	Jumlah penerima	434	434
3	Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan	-	-
4	Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas	-	-

Sumber : Data wawancara mendalam

KELURAHAN PELEBON KECAMATAN PEDURUNGAN

No	Pertanyaan	2005	2008
1	Jumlah keluarga miskin	482	452
2	Jumlah penerima	391	399
3	Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan	-	-
4	Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas	-	66

Sumber : Data wawancara mendalam

KELURAHAN LAMPER LOR KECAMATAN SEMARANG SELATAN

No	Pertanyaan	2005	2008
1	Jumlah keluarga miskin	1350	2000
2	Jumlah penerima	328	328
3	Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan	-	-
4	Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas	-	-

Sumber : Data wawancara mendalam

KELURAHAN SAMBIROTO KECAMATAN TEMBALANG

No	Pertanyaan	2005	2008
1	Jumlah keluarga miskin	650	779
2	Jumlah penerima	422	422
3	Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan	-	-
4	Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas	20	20

Meninggal 1, pindah 19

Sumber : Data wawancara mendalam

KELURAHAN PUDAK PAYUNG KECAMATAN BANYUMANIK

No	Pertanyaan	2005	2008
1	Jumlah keluarga miskin		
2	Jumlah penerima	607	607
3	Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan	-	-
4	Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas	-	-

Sumber : Data wawancara mendalam

KELURAHAN KALI BANTENG KULON KECAMATAN SEMARANG BARAT

No	Pertanyaan	2005	2008
1	Jumlah keluarga miskin	640	640
2	Jumlah penerima	336	336
3	Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan	-	-
4	Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas	-	15

Dari 15 yang tidak sesuai karena ada perbedaan nama di kartu BLT dengan nama di KTP diatasi dengan surat pengantar DP5

Sumber : Data wawancara mendalam

KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA

No	Pertanyaan	2005	2008
1	Jumlah keluarga miskin	3500	3500
2	Jumlah penerima	2315	2315
3	Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan	-	-
4	Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas	-	Ada

Ketidaksesuaian data dengan identitas disikapi dengan DP5

Sumber : Data wawancara mendalam

KELURAHAN GAYAMSARI

No	Pertanyaan	2005	2008
1	Jumlah keluarga miskin	450	450 lebih
2	Jumlah penerima	490	490
3	Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan	-	-
4	Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas	-	-

Yang tidak sesuai identitas dengan kartu BLT disikapi dengan surat pengantar menggunakan DP5

Sumber : Data wawancara mendalam

LAMPIRAN 2. DAFTAR PERTANYAAN



KUESIONER UNTUK SURVEY RUMAH TANGGA NO

--	--	--	--

Nama penerima BLT : _____
Jumlah tanggungan dalam kel : _____
Pekerjaan : _____
Penghasilan rata-rata/bulan : _____
Alamat rumah : _____
Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Tanggal kuesioner : _____

Isilah kuesioner ini dengan **melingkari nomor** (untuk pertanyaan tertutup) atau **menuliskan** jawaban (pertanyaan terbuka) berdasarkan jawaban responden

PENDISTRIBUSIAN BLT

1. Ketika anda menerima kartu BLT apakah terdapat ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jika ya, jelaskan bentuk ketidakcocokannya
3. Apakah anda mengalami kasus penundaan pendistribusian kartu BLT
 - a. Ya
 - b. Tidak

4. Menurut anda apakah faktor yang menghambat penyaluran BLT di wilayah anda? (boleh memilih lebih dari satu)
 - a. jumlah petugas di setiap kantor pos terlalu sedikit
 - b. antrean yang terlalu panjang selama pencairan dana
 - c. Rumah tinggal jauh sehingga harus mengeluarkan biaya transpor yang mahal
 - d. tidak adanya pelayanan keliling atau penyediaan pos pelayanan tambahan
 - e. lain-lain _____ sebutkan
5. Apakah jadwal pencarian BLT disosialisasikan dengan baik?
 - a. Ya
 - b. tidak
6. Apakah loket pencairan BLT mencukupi untuk pelayanan?
 - a. Ya
 - b. tidak
7. Apakah aparat bersedia mengunjungi langsung untuk pencairan BLT di wilayah yang relatif jauh?
 - a. Ya
 - b. tidak
8. Apakah wilayah anda mensyaratkan adanya bukti diri (KTP) yang harus dimiliki oleh penerima?
 - a. Ya
 - b. tidak
9. Bila tidak memiliki bukti diri (KTP), apakah anda dipungut biaya ketika mencairkan BLT?
 - a. Ya
 - b. tidak
10. bila ya, berapa biaya yang dipungut?
11. Apakah ketika mencairkan BLT, anda diminta memberi sumbangan sukarela?
 - a. Ya
 - b. tidak
12. Apakah terdapat potongan lain dengan alasan untuk didistribusikan ke masyarakat miskin yang belum mendapat?
 - a. Ya
 - b. tidak
13. Bila ya, berapa potongan yang dipungut?
14. Apakah terdapat posko pengaduan apabila terjadi kesalahan dalam pendistribusian BLT?
 - a. Ya
 - b. tidak
15. Apakah cara pengaduan diinformasikan secara luas?
 - a. Ya
 - b. tidak
16. Apakah muncul ketidakpuasan masyarakat sekitar anda dalam pendistribusian BLT?
 - a. Ya
 - b. tidak
17. Bila ya, apa bentuk ketidakpuasan masyarakat yang muncul

- a. Keluhan
 - b. Protes keras
 - c. Demonstrasi
 - d. Ancaman
 - e. Pengrusakan
 - f. Lain-lain sebutkan
18. Apakah anda puas dengan penetapan sasaran yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- a. Sangat tidak puas
 - b. Tidak puas
 - c. Puas
 - d. Sangat puas
19. Apakah anda puas dengan ketepatan sasaran yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- a. Sangat tidak puas
 - b. Tidak puas
 - c. Puas
 - d. Sangat puas
20. Apakah anda puas dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT (berkaitan dengan waktu dan tempat)?
- a. Sangat tidak puas
 - b. Tidak puas
 - c. Puas
 - d. Sangat puas
21. Apakah anda puas dengan pembagian kartu yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- a. Sangat tidak puas
 - b. Tidak puas
 - c. Puas
 - d. Sangat puas
22. Apakah anda puas dengan pencairan dana yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- a. Sangat tidak puas
 - b. Tidak puas
 - c. Puas
 - d. Sangat puas
23. Apakah anda puas dengan penanganan masalah yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- a. Sangat tidak puas
 - b. Tidak puas
 - c. Puas
 - d. Sangat puas
24. Apakah terdapat masyarakat di sekeliling anda yang tidak seharusnya menerima BLT?
- a. Ya
 - b. Tidak
25. Bila ya, kira-kira dalam lingkungan sekitar anda terdapat berapa orang yang tidak seharusnya menerima BLT?
- a. <5 orang
 - b. 6-10 orang
 - c. 11 – 15 orang
 - d. > 15 orang
26. Bila ya, menurut anda mengapa orang tersebut tidak berhak menerima bantuan?
-
27. Apakah terdapat masyarakat miskin di sekeliling anda yang seharusnya menerima BLT, tetapi justru tidak menerima?

- a. Ya
b. Tidak
28. Bila ya, kira-kira berapa orang?
a. <5 orang
b. 6-10 orang
c. 11 – 15 orang
d. > 15 orang

DAMPAK EKONOMIS BLT

1. Menurut perasaan anda, bagaimanakah kesejahteraan keluarga ini selama setahun terakhir?
 - a. Kurang sejahtera
 - b. Cukup sejahtera
 - c. Sangat sejahtera
2. Rata-rata, berapa kali seminggu keluarga ini mengkonsumsi **daging** atau **telor** atau **ikan** atau **ayam** selama sebulan terakhir?
 - a. ≤ 2 kali
 - b. 3–5 kali
 - c. 6 kali
3. Berapa kali seminggu keluarga ini mengkonsumsi **sayur** atau **buah** selama sebulan terakhir?
 - a. ≤ 2 kali
 - b. 3–5 kali
 - c. 6 kali
4. Apakah keluarga ini memiliki:
 - Toilet (di dalam rumah)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - Lantai keramik?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - sepeda motor?
 - c. Ya
 - d. Tidak
 - Kulkas atau TV?
 - e. Ya
 - f. Tidak
5. Apakah rumah ini memiliki listrik?
 - a. Tidak
 - b. Ya, tapi rusak
 - c. Ya, dan berfungsi
6. Berapa daya listrik di rumah anda?
 - a. 450 watt
 - b. 900 watt
 - c. > 1300 watt
7. Apakah anda tahu bahwa BLT ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah anda merasa senang dengan adanya BLT ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah anda merasa memiliki daya beli yang lebih tinggi setelah menerima BLT?
 - a. Ya
 - b. Tidak

- a. Ya
b. Ragu-ragu
c. Tidak
25. Apakah BLT akan membuat anda menjadi tidak produktif dan menggantungkan diri pada BLT?
a. Ya
b. Ragu-ragu
c. Tidak
26. Apakah BLT akan membuat masyarakat di sekitar anda menjadi malas dan tidak produktif?
a. Ya
b. Ragu-ragu
c. Tidak
27. Bila anda diminta memilih bentuk bantuan yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, maka bantuan semacam apa yang anda pilih?
a. Tetap BLT
b. Sembako murah dalam bentuk barang (seharga BLT)
c. Pengobatan gratis per bulan (seharga BLT)
d. Uang sekolah gratis per bulan (seharga BLT)
e. lain-lain, sebutkan
28. Uang BLT habis dalam jangka waktu?
29. Jumlah BLT per bulan yang layak menurut anda?

Isilah

Pertanyaan	Sebelum kenaikan BBM	Sesudah kenaikan BBM
Rata-rata penghasilan per bulan		
Rata-rata pengeluaran per bulan		
Rata-rata Konsumsi bahan bakar per bulan <ul style="list-style-type: none"> • Minyak tanah • Bensin • LPG 		
Rata-rata Konsumsi sembako per bulan		
Rata-rata biaya berobat per bulan		
Rata-rata pengeluaran transportasi umum perbulan		



Bank Indonesia
Bekerjasama dengan
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen
SURVEI EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DI KOTA SEMARANG

NO

--	--	--	--

KUESIONER UNTUK PETUGAS PELAKSANA DISTRIBUSI BLT (KETUA RT)

Nama : _____

Jabatan : _____

Alamat : _____

Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

Tanggal pengembalian kuesioner : _____

*Isilah kuesioner ini dengan **melingkari nomor** (untuk pertanyaan tertutup) atau **menuliskan jawaban** (pertanyaan terbuka) berdasarkan jawaban responden*

PENDISTRIBUSIAN KARTU BLT

1. Apakah dilakukan sosialisasi pada tahap pendataan penerima BLT?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah anda dilibatkan dalam penentuan target sasaran BLT?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah terdapat ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah terdapat kasus penundaan pendistribusian kartu BLT atas permintaan masyarakat?

16. Bila terjadi aksi protes dan ancaman, maka cara aparat pemerintah meredamnya dengan
- Dibuka kembali pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak
 - Ada kesediaan penerima BLT untuk membagi sebagian dana kepada rumah tangga miskin lainnya
 - Ada pejabat yang menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima BLT pada tahap berikutnya
 - Lain-lain sebutkan
17. Sebagai aparat, apakah anda puas dengan penetapan sasaran yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- Sangat tidak puas
 - Tidak puas
 - Puas
 - Sangat puas
18. Sebagai aparat, apakah anda puas dengan ketepatan sasaran yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- Sangat tidak puas
 - Tidak puas
 - Puas
 - Sangat puas
19. Sebagai aparat, apakah anda puas dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- Sangat tidak puas
 - Tidak puas
 - Puas
 - Sangat puas
20. Sebagai aparat, apakah anda puas dengan pembagian kartu yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- Sangat tidak puas
 - Tidak puas
 - Puas
 - Sangat puas
21. Sebagai aparat, apakah anda puas dengan pencairan dana yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- Sangat tidak puas
 - Tidak puas
 - Puas
 - Sangat puas
22. Sebagai aparat, apakah anda puas dengan penanganan masalah yang dilakukan pemerintah dalam pencairan BLT?
- Sangat tidak puas
 - Tidak puas
 - Puas
 - Sangat puas
23. Apakah terdapat masyarakat di sekeliling anda yang tidak seharusnya menerima BLT?
- Ya
 - Tidak
24. Bila ya, kira-kira dalam lingkungan sekitar anda terdapat berapa orang yang tidak seharusnya menerima BLT?

- a. <5 orang
 b. 6-10 orang
 c. 11 – 15 orang
 d. > 15 orang
25. Bila ya, menurut anda mengapa orang tersebut tidak berhak menerima bantuan?

26. Apakah terdapat masyarakat miskin di sekeliling anda yang seharusnya menerima BLT, tetapi justru tidak menerima?

- a. Ya
 b. Tidak

27. Bila ya, kira-kira dalam berapa orang?

- a. <5 orang
 b. 6-10 orang
 c. 11 – 15 orang
 d. > 15 orang

DAMPAK PROGRAM

- Apakah BLT bermanfaat bagi masyarakat di sekitar anda?
 a. Ya
 b. Tidak
 a. Ragu-ragu
- Apakah BLT hanya semacam “memberikan ikan dan bukan kail” kepada masyarakat?
 a. Ya
 b. Ragu-ragu
 c. Tidak
- Apakah BLT akan membuat masyarakat di sekitar anda menjadi malas dan tidak produktif?
 a. Ya
 b. Ragu-ragu
 c. Tidak
- Apakah program ini kontraproduktif terhadap program pemberdayaan masyarakat?
 a. Ya
 b. Ragu-ragu
 c. Tidak
- Jumlah BLT per bulan yang layak menurut anda?

Isilah

Pertanyaan	2005	2008
Jumlah keluarga miskin di RT		
Jumlah penerima BLT di RT		
Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan		
Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas		

PANDUAN INDEPTH INTERVIEW

Pertanyaan	2005	2008
Jumlah keluarga miskin di kelurahan		
Jumlah penerima BLT di kelurahan		
Jumlah keluarga miskin di kecamatan		
Jumlah penerima BLT di kecamatan		
Jumlah penerima BLT yang tidak mencairkan		
Jumlah ketidakcocokan kartu BLT dengan identitas		

1. Apakah jumlah penerima BLT sesuai dengan jumlah penerima BLT periode lalu?
2. Apakah jumlah keluarga miskin lebih banyak/sedikit dibandingkan periode lalu (2005)
3. Apakah ada keluarga miskin yang tidak menerima BLT? Berapa jumlahnya/prosentasenya?
4. Apakah ada keluarga “mampu” yang menerima BLT? Berapa jumlahnya/prosentasenya?
5. Apakah BLT diterimakan secara penuh, tidak ada “potongan”?
6. Apakah ada perubahan penerima BLT?
7. Apakah ada “penjaringan” kembali keluarga miskin?
8. Apakah RT menentukan warganya yang termasuk keluarga miskin?
9. Apakah RT/RW dilibatkan dalam penerimaan BLT?
10. Apakah ada pengaduan tentang kesulitan penerimaan BLT? Apa saja?
11. Apakah tersedia pelayanan pengaduan? Seperti apa? Bagaimana?
12. Usulan bagi kelancaran penyaluran BLT di masa datang